

**PERAN PERSATUAN PEMUDA DAN PEMUDI KUTA
CEPU (P3KC) TERHADAP PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA KUTA CEPU KECAMATAN
SIMPANG KIRI KOTA SUBULUSSALAM**

SKRIPSI

Oleh :
SUMIANTO
NPM.1303090059

Program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama Mahasiswa : **SUMIANTO**
N P M : 1303090059
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Judul Skripsi : PERAN PERSATUAN PEMUDA DAN PEMUDI KUTA CEPU (P3KC) TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KUTA CEPU KECAMATAN SIMPANG KIRI KOTA SUBULUSSALAM

Medan, 02 April 2018

PEMBIMBING I



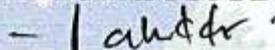
Drs. EFENDI AGUS, M.Si

PEMBIMBING II



Drs. ABDUL JALAL BATUBARA

DISETUJUI OLEH,
KETUA PROGRAM STUDI



MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP



DEKAN,

Dr. ARICHA SALEH, S.Sos., M.SP

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : **SUMIANTO**
N P M : 1303090059
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Pada hari, tanggal : Rabu, 05 April 2018
Waktu : 14.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Dr. ARIFIN SALEH, M.SP

PENGUJI II : MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP

PENGUJI III : Drs. EFENDI AGUS, M.Si

PENGUJI IV : Drs. ABDUL JALAL BATUBARA

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wbr.

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul “Peran Persatuan Pemuda Dan Pemudi Kuta Cepu (P3KC) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Kuta Cepu Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam”.

Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup saya, merekalah yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi saya selama ini yakni “Ayahanda Alm. M. Yusuf dan Ibunda Midek”. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah kepada mereka.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Rudianto, S.sos.,M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Drs. Efendi Agus, M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Drs. Abdul Jalal Batubara, M.AP selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian, motivasi dan arahan serta saran dalam membimbing sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
4. Bapak dan Ibu staf pengajar yang mengajar selama ini di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
5. Kepada teman-teman seperjuangan khususnya Sabtudin, Firmansyah, Paisal Pardosi, Basuki, Riski Pardosi, Edi Ariyanto, Habibi, Marni, Safrina, Ikhwanul Hakim, dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya, saya berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi saya, akan tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, April 2018

Penulis

Sumianto

ABSTRAK

PERAN PERSATUAN PEMUDA DAN PEMUDI KUTA CEPU (P3KC) TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KUTA CEPU KECAMATAN SIMPANG KIRI KOTA SUBULUSSALAM

SUMIANTO
NPM.1303090059

Salah satu organisasi kemasyarakatan yang menampung aspirasi dan melibatkan generasi muda adalah Persatuan Pemuda Dan Pemudi Kuta Cepu (P3KC). Selain menampung aspirasi, P3KC juga berperan sebagai wadah penanaman rasa kebangsaan secara nasional, pengembangan potensi diri dan merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang kesejahteraan sosial. Program kerja jangka menengah yaitu pembentukan kelompok tani, kelompok usaha dibidang peternakan sapi, pembuatan gapura program kerja jangka panjang yaitu pengadaan bangunan P3KC dan pembinaan atau seminar mengenai bahaya narkoba, miras dan HIV AIDS. P3KC dibentuk pada Tahun 2006 dengan beranggotakan 12 orang dan terdiri dari putra-putri asli dari desa Kuta Cepu.

Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 2 bulan yang dilaksanakan di Desa Kutacepu Kecamatan Simpangkiri Kota Subulussalam. Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis kualitatif. Data-data penelitian diperoleh melalui penelitian lapangan yaitu dengan melalui observasi dan wawancara mendalam oleh beberapa narasumber yang terdiri dari satu Kepala Desa, satu sekertaris Desa dan dua anggota masyarakat. Data yang diperoleh dan dianalisis secara deskriptif kualitatif sesuai dengan tujuan penelitian yang dicapai. Data sekunder diperoleh dari buku-buku penunjang penelitian serta bahan-bahan lain yang sesuai dengan kajian penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Persatuan Pemuda Dan Pemudi Kuta Cepu (P3KC) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Kuta Cepu Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam.

Hasil analisis menunjukkan bahwa Persatuan Pemuda Dan Pemudi Kuta Cepu (P3KC) ini telah lama dibentuk di Desa Kuta Cepu. Persatuan Pemuda Dan Pemudi Kuta Cepu (P3KC) di Desa Kuta Cepu berjalan baik dengan dibantu oleh lembaga sosial lain yang ada di desa dan pihak Pemerintah Desa. Persatuan Pemuda Dan Pemudi Kuta Cepu (P3KC) melaksanakan pembangunan di desa dengan dibantu partisipasi dari masyarakat desa. Bentuk-bentuk partisipasi tersebut dapat dilihat melalui musyawarah yang dilakukan serta pelaksanaan suatu rencana pembangunan desa.

Kata kunci: peran, pemberdayaan masyarakat, desa.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Sistematika Penulisan	5
Bab II : URAIAN TEORITIS	
A. Pengertian Peran	7
B. Pengertian Kesejahteraan Sosial	9
C. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat	14
D. Pengertian Masyarakat	20
E. Pengertian Desa	22
Bab III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	29
B. Kerangka Konsep	30
C. Definisi Konsep	31
D. Kategorisasi	32
E. Narasumber	32
F. Teknik Pengumpulan Data	33
G. Teknik Analisis Data	34

	H. Lokasi dan Waktu Penelitian	37
Bab IV :	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Penyajian Data.....	39
	B. Hasil Penelitian	39
	C. Pembahasan	60
Bab V :	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	64
	B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pasal 94 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa

Untuk mencapai tujuan nasional tersebut dilaksanakan berbagai upaya pembangunan dan pemberdayaan disegala bidang, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Salah satu sumber daya yang sering menjadi permasalahan yaitu sumber daya manusia, yang berhubungan erat dengan kualitas manusia yang pada dasarnya sumber daya manusia itu adalah bagian dan generasi muda. Karena generasi muda inilah yang akan kelak meneruskan tongkat estafet kepemimpinan dimasa yang akan datang, sehingga kita membutuhkan generasi yang terampil, berakhlak, bermoral serta cinta tanah air dan dapat diandalkan di tengah masyarakat terutama bangsa dan negara.

Peranan generasi muda sebagai pilar, penggerak, dan pengawal jalannya reformasi dan pembangunan sangat diharapkan. Generasi muda adalah remaja yang nantinya akan menjadi tunas harapan dan modal pembangunan bangsa yang akan datang seperti yang dikemukakan Damayanty (2012:3). Menurut Syukur (2008:27) generasi muda atau pemuda adalah penduduk yang berusia 15-35 tahun,

yaitu mereka yang diidealkan sebagai sosok yang penuh energi, semangat, dan kreativitas untuk menciptakan semangat pembaharuan.

Namun permasalahan yang dihadapi generasi muda yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan dirinya menurut Direktorat Kesejahteraan Anak dan Remaja (1978 :37) menyebutkan ada sembilan hal yaitu sebagai berikut: (1) Kekurangpastian generasi muda dihari depan, (2) Tidak seimbangny jumlah anak dan remaja/generasi muda dengan fasilitas pendidikan yang tersedia, (3) Cukup besarnya jumlah anak dan remaja yang berhenti sekolah dan anak/remaja yang tidak sekolah, (4) Kekurangan/terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia bagi pemuda/pemudi dan jumlah pengangguran dikalangan generasi muda yang semakin mengkhawatirkan; (5) Kekurangan gizi yang diperlukan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, (6) Perkawinan dibawah umur yang masih banyak dilakukan oleh golongan-golongan masyarakat terutama masyarakat pedesaan; (7) Adanya generasi muda yang menderita fisik dan mental social, (8) Keberandalan dan kenakalan remaja, (9) Penyalahgunaan narkotika dikalangan muda-mudi.

Melihat permasalahan yang dihadapi generasi muda tersebut, maka perlu adanya suatu usaha yang nantinya akan dapat membantu generasi muda yang bermasalah ini dalam memecahkan masalahnya, yang mana usaha tersebut memerlukan suatu wadah untuk membina dan mengarahkan generasi muda tersebut, pelaksanaan pembinaan tersebut merupakan tugas dan kewajiban aparat pelaksana baik dari tingkat pusat maupun daerah yang sesuai dengan bidangnya, yang diterjemahkan ketengah masyarakat terutama dalam pemberian bantuan dan

bimbingan yaitu dengan membentuk suatu organisasi yang nantinya akan menjadi wadah pembinaan generasi muda tersebut terkhususnya di pedesaan.

Salah satu organisasi kemasyarakatan yang menampung aspirasi dan melibatkan generasi muda adalah Persatuan Pemuda Dan Pemudi Kuta Cepu (P3KC). Selain menampung aspirasi, P3KC juga berperan sebagai wadah penanaman rasa kebangsaan secara nasional, pengembangan potensi diri dan merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang kesejahteraan sosial. Program kerja jangka menengah yaitu pembentukan kelompok tani, kelompok usaha dibidang peternakan sapi, pembuatan gapura program kerja jangka panjang yaitu pengadaan bangunan P3KC dan pembinaan atau seminar mengenai bahaya narkoba, miras dan HIV AIDS. P3KC dibentuk pada Tahun 2006 dengan beranggotakan 12 orang dan terdiri dari putra-putri asli dari desa Kuta Cepu.

Desa Kuta Cepu merupakan salah satu kampong yang ada di kecamatan Simpang Kiri, kota Subulussalam, Provinsi Aceh, Indonesia. Desa ini merupakan satu dari 14 desa dan kelurahan yang berada di kecamatan Simpang Kiri. Desa ini memiliki jumlah penduduknya sebagian besar bersuku daerah Aceh. Desa Kuta Cepu sendiri memiliki sumber daya yang besar dalam hal pariwisata, pertanian, perkebunan, dan perikanan laut. Sementara yang telah diberdayakan atau masyarakat menggelutinya bahwa paling banyak di bidang pertanian, kedua di bidang nelayan, kemudian di bidang Pariwisata. Sementara peran pemerintah dalam memberdayakan potensi masyarakat tersebut belum begitu maksimal, karena banyak potensi sumber daya yang besar, justru belum dikelola dengan baik dalam hal ini untuk mendapatkan pendapatan bagi masyarakat atau ke kas desa

Dari uraian diatas, penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul: “Peran Persatuan Pemuda Dan Pemudi Kuta Cepu (P3KC) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Kuta Cepu Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam”

B. Perumusan Masalah

Agar penulisan karya tulis ini menjadi terarah dan tidak meluas kepada pembahasan lainnya, maka penulis merumuskan masalahnya Bagaimana Peran Persatuan Pemuda Dan Pemudi Kuta Cepu (P3KC) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Kuta Cepu Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan serta suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan. Dalam tujuan melakukan penelitian untuk memperoleh pengetahuan yang dapat menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah. Dengan demikian tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu untuk mengetahui Peran Persatuan Pemuda Dan Pemudi Kuta Cepu (P3KC) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Kuta Cepu Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna bagi :

1. Akademis :
 - a. Memberikan sumbangan bagi kepentingan dan perkembangan ilmu pengetahuan

- b. Sebagai referensi untuk kepentingan penelitian lanjutan dan untuk memperdalam pengetahuan yang berkaitan tentang peran persatuan pemuda dan pemudi Kuta Cepu (P3KC) terhadap pemberdayaan masyarakat

2. Praktis :

- a. Dapat berguna bagi lembaga yang bersangkutan dalam mengembangkan peran persatuan pemuda dan pemudi Kuta Cepu (P3KC) terhadap pemberdayaan masyarakat yang efektif bagi masyarakat Desa Kuta Cepu Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam
- b. Lebih mengetahui gambaran peran persatuan pemuda dan pemudi Kuta Cepu (P3KC) terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Kuta Cepu Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam
- c. Memberikan kesempatan untuk memperdalam pengetahuan dan wawasan

E. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan standar penulisan maka dalam penyusunan skripsi ini akan dibagikan dalam lima bab, selanjutnya masing-masing bab dibagi dalam beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan. Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II : Tinjauan Teoritis. Bab ini berisikan uraian dan konsep-konsep yang berkaitan dengan peranan

- BAB III : Jenis Penelitian, Kerangka Konsep, Definisi Konsep, Kategorisasi, Narasumber/Informan, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisa Data, Lokasi dan Waktu Penelitian.
- BAB IV : Hasil Penelitian Dan Pembahasan.
- BAB V : Bab ini berisikan kesimpulan penelitian dan saran

BAB II

URAIAN TEORITIS

A. Pengertian Peran

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Menurut Abu Ahmadi (1982) peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002: 243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Berdasarkan uraian diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Menurut Soerjono Soekanto (1987: 220) sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas perhubungan dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total *enforcement*, yaitu penegakan hukum secara penuh, sedangkan peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut. Misalnya dinas perhubungan sebagai suatu organisasi formal tertentu diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dapat bertindak sebagai pengayom bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan

ketertiban, keamanan yang mempunyai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat, artinya peranan yang nyata, (Soerjono Soekamto).

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi.

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan / diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama

Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, syarat-syarat peran mencakup 3 (tiga) hal, yaitu : Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran (role). Menurut Miftah Thoha (1997: 23), peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas ada baiknya terlebih dahulu kita pahami tentang pengertian peran.

Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Berdasarkan hal-hal diatas dapat diartikan bahwa apabila dihubungkan dengan dinas sosial, peran tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan merupakan tugas dan wewenang dinas sosial.

B. Pengertian Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk

pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial (Undang-Undang No 11 Tahun 2009 Pasal 1 dan 2).

Kesejahteraan merupakan suatu hal yang bersifat subjektif, sehingga setiap keluarga atau individu di dalamnya yang memiliki pedoman, tujuan, dan cara hidup yang berbeda akan memberikan nilai yang berbeda tentang faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan (BKKBN 1992).

Kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik (2007) adalah suatu kondisi dimana seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga tersebut dapat dipenuhi sesuai dengan tingkat hidup. Status kesejahteraan dapat diukur berdasarkan proporsi pengeluaran rumah tangga (Bappenas, 2000). Rumah tangga dapat dikategorikan sejahtera apabila proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok sebanding atau lebih rendah dari proporsi pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok. Sebaliknya rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok, dapat dikategorikan sebagai rumah tangga dengan status kesejahteraan yang masih rendah.

Menurut Rambe (2004: 67), kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman diri, rumah tangga serta masyarakat lahir dan batin yang memungkinkan setiap warga negara dapat melakukan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang

sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumah tangga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi.

Arthur Dunham dalam Sukoco (1991: 45) mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial melalui pemberian bantuan kepada orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di dalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan, dan hubungan-hubungan sosial. Pelayanan kesejahteraan sosial memberi perhatian utama terhadap individu-individu, kelompok-kelompok, komunitas-komunitas, dan kesatuan-kesatuan penduduk yang lebih luas; pelayanan ini mencakup pemeliharaan atau perawatan, penyembuhan dan pencegahan.

Pendapat lain tentang kesejahteraan sosial diungkapkan pula oleh Friedlander dalam Sukoco (1991: 78): (*“Social welfare is the organized system of social services and institutions, designed to aid individuals and groups to attain satisfying standards of life and health, and personal and social relationships which permit them to develop their full capacities and to promote their well-being in harmony with the needs of their families and the community”*)

Yaitu bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga, yang bermaksud untuk membantu individu-individu dan kelompok agar mencapai standar kehidupan dan kesehatan yang memuaskan, serta hubungan

perorangan dan sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan segenap kemampuan dan meningkatkan kesejahteraan petani selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga maupun masyarakat.

Kesejahteraan sosial bisa dipandang sebagai ilmu dan didisiplin akademis. Dalam hubungan ini, kesejahteraan sosial adalah studi tentang lembaga-lembaga, program-program, personel, dan kebijakan-kebijakan yang memusatkan pada pemberian pelayanan-pelayanan sosial kepada individu-individu, kelompok-kelompok, dan masyarakat-masyarakat. Ilmu kesejahteraan sosial berupaya mengembangkan basis pengetahuannya untuk mengidentifikasi masalah sosial, penyebabnya dan strategi penanggulangannya.

Konsep kesejahteraan sosial sebagai suatu program yang teroganisir dan sistematis yang dilengkapi dengan segala macam keterampilan ilmiah, merupakan sebuah konsep yang relative baru berkembang. Kesejahteraan sosial memiliki arti kepada keadaan yang baik dan banyak orang yang menamainya sebagai kegiatan amal. Di amerika serikat kesejahteraan sosial juga diartikan sebagai bantuan publik yang dilakukan oleh pemerintah bagi keluarga miskin. Para pakar ilmu social mendefinisikan kesejahteraan sosial dengan tinggi rendahnya tingkat hidup masyarakat. Kesejahteraan sosial menurut Rukminto (2005:17), Kesejahteraan social adalah:

Suatu ilmu terapan yang mengkaji dan mengembangkan kerangka pemikiran serta metodologi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup (kondisi) masyarakat antara lain melalui pengelolaan masalah sosial; pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, dan pemaksimalan kesempatan anggota masyarakat untuk berkembang.

Pengertian di atas menyatakan bahwa kesejahteraan sosial dimanfaatkan untuk meningkatkan sebuah kualitas hidup melalui sebuah pengelolaan masalah social untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sehingga masyarakat terdorong dan bisa mencapai ke arah kehidupan yang lebih baik lagi. Merujuk kepada undang-undang No.11 tahun 2009 yang dikutip oleh Suharto (2009:153) mendefinisikan

Kesejahteraan Sosial adalah: “Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melakukan fungsi sosialnya”. Adanya pemenuhan kebutuhan oleh masyarakat baik itu materil, spiritual, dan sosial sehingga akan mendorong masyarakat menuju ke arah kualitas hidup yang lebih baik dan mencapai fungsi sosialnya. Dalam hal ini peran dari tanggung jawab pemerintah dalam peningkatan kualitas kehidupan warga masyarakatnya harus ditingkatkan.

Ilmu kesejahteraan sosial merupakan kelanjutan dan sebuah penyempurnaan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh Karena itu latar belakang sejarah dari ilmu kesejahteraan sosial pada titik awal masihlah sama dengan pekerjaan sosial. Adapun definisi pekerjaan sosial menurut *Internasional Federation of Social Workers (IFSW)* (2000) yang dikutip oleh Adi (2005:12) adalah:

The social worker profession promotes social change, problem solving in human relationships and the empowerment and liberation of people to enhance well-being. Utilizing theories of human behavior and

social systems, social work intervenes at the points where people interact with the environments. Principles of human rights and social justice are fundamental to social work.

Profesi pekerjaan sosial mendorong agar terciptanya perubahan sosial, membantu dalam pemecahan masalah pada relasi manusia, serta memberdayakan dan membebaskan manusia untuk mencapai derajat suatu kehidupan yang lebih baik. Upaya yang dilakukan tersebut dilakukan dengan menggunakan teori-teori perilaku manusia dan sistem sosial. Pekerjaan sosial mengintervensi ketika seseorang sedang berinteraksi dengan lingkungannya. Sedangkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial merupakan hal yang sangat penting bagi pekerja sosial.

Pekerjaan sosial adanya kegiatan pemberian pelayanan sosial agar individu mampu menjalankan fungsi sosialnya di masyarakat sebagai biasanya. Senada dengan apa yang diungkapkan oleh Zastrow yang dikutip oleh Huraerah (2011:38) yang mengatakan definisi pekerjaan sosial adalah:

Pekerjaan sosial adalah aktivitas profesional untuk menolong individu, kelompok, dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut.

Kesejahteraan sosial dalam artian yang sangat luas mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai tingkat kehidupan masyarakat yang lebih baik. Kesejahteraan Sosial adalah sistem yang terorganisir dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang

bertujuan untuk membantu individu dan kelompok untuk mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan dan relasi-relasi pribadi dan sosial yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan kemampuannya sepihak mungkin dan meningkatkan kesejahteraannya selaras dengan kebutuhan keluarga dan masyarakatnya (Friedlander, dalam Muhidin, 1992: 1).

Sementara Wickenden (dalam Muhidin, 1992) mengemukakan bahwa kesejahteraan sosial termasuk didalamnya peraturan perundangan, program, tunjangan dan pelayanan yang menjamin atau memperkuat pelayanan untuk memenuhi kebutuhan sosial yang mendasar dari masyarakat serta menjaga ketentraman dalam masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi dapat terlihat dari rumusan Undang-

Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial pasal 2 ayat 1 : “Kesejahteraan Sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir dan batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, sosial yang

sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila” (Muhidin, 1992).

Dari berbagai pengertian di atas dapat terlihat luas lingkup pengertian kesejahteraan sosial yang sebenarnya sangat meluas dan melingkupi berbagai aspek kehidupan. Dalam kesejahteraan sosial juga terdapat usaha kesejahteraan sosial, dimana pelayanan sosial juga termasuk dari salah satu di dalamnya. Pelayanan sosial diartikan dalam dua macam, yaitu:

1. Pelayanan sosial dalam arti luas adalah pelayanan sosial yang mencakup fungsi pengembangan termasuk pelayanan sosial dalam bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, tenaga kerja dan sebagainya.
2. Pelayanan sosial dalam arti sempit atau disebut juga pelayanan kesejahteraan sosial mencakup program pertolongan dan perlindungan kepada golongan yang tidak beruntung seperti pelayanan sosial bagi anak terlantar, keluarga miskin, cacat, tuna sosial dan sebagainya (Muhidin, 1992: 41).

Maka dapat diartikan bahwa efektifitas pelayanan sosial adalah tercapainya tujuan yang sudah ditetapkan berdasarkan makna dari pelayanan sosial itu sendiri. Dikatakan efektif apabila hasil yang dicapai dari pelayanan sosial yang diberikan telah sesuai dengan apa tujuan awal yang telah ditetapkan. Kebanyakan pengertian pelayanan sosial di Negara-negara maju sama dengan poin pertama, sedangkan di Negara-negara berkembang umumnya sama dengan poin kedua. Di Negara Amerika Serikat, pelayanan

sosial diartikan sebagai suatu aktivitas yang terorganisir yang bertujuan untuk menolong orang-orang agar terdapat suatu penyesuaian timbal balik antara individu dengan lingkungan sosialnya. Tujuan ini dapat dicapai melalui teknik dan metode yang diciptakan untuk memungkinkan individu, kelompok dan masyarakat dan melalui tindakan-tindakan kooperatif untuk meningkatkan kondisi-kondisi sosial dan ekonomi.

Sedangkan di Inggris, pelayanan sosial mencakup suatu peralatan luas untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan di mana mereka hidup dalam keseluruhan yang mempunyai tanggung jawab untuk menolong masyarakat yang lemah dan kurang beruntung dan memberikan perlindungan dengan pelayanan-pelayanan yang tidak mungkin dipenuhi oleh mereka sendiri secara perseorangan. Pada umumnya baik kualitas maupun kuantitas daripada pelayanan social akan berbeda-beda sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemakmuran suatu Negara dan juga sesuai dengan faktor sosiokultural dan politik yang juga menentukan masalah prioritas pelayanan. Semakin tersebar dan dipraktekkan secara universal pelayanan sosial, maka pelayanan sosial cenderung menjadi pelayanan yang ditujukan kepada golongan masyarakat yang membutuhkan pertolongan khusus.

C. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah strategi, sekarang telah banyak diterima, bahkan telah berkembang dalam berbagai literatur di dunia barat. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pembangunan Sosial di Kopenhagen tahun 1992 juga telah memuatnya dalam berbagai kesepakatannya. Namun,

upaya mewujudkannya dalam praktik pembangunan tidak selalu berjalan mulus.

Banyak pemikir dan praktisi yang belum memahami dan mungkin tidak meyakini bahwa konsep pemberdayaan merupakan alternatif pemecahan terhadap dilema-dilema pembangunan yang dihadapi. Mereka yang berpegang pada teori-teori pembangunan model lama juga tidak mudah untuk menyesuaikan diri dengan pandangan-pandangan dan tuntutan-tuntutan keadilan. Mereka yang tidak nyaman terhadap konsep partisipasi dan demokrasi dalam pembangunan tidak akan merasa tentram dengan konsep pemberdayaan ini. Lebih lanjut, disadari pula adanya berbagai bias terhadap pemberdayaan masyarakat sebagai suatu paradigma baru pembangunan.

Menurut Chambers dalam Kartasasmita (1996: 21), pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “partisipasi (*participatory*), pemberdayaan (*empowering*), dan berkelanjutan (*sustainable*)”.

Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*), yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan dimasa yang lalu.

Menurut Prijono dan Pranarka (1996: 67), lahirnya konsep pemberdayaan sebagai antitesa terhadap model pembangunan yang kurang

memihak pada rakyat mayoritas. Konsep ini dibangun dari kerangka logik sebagai berikut: (1) bahwa proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan kekuasaan faktor produksi; (2) pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat pengusaha pinggiran; (3) kekuasaan akan membangun bangunan atas atau system pengetahuan, sistem politik, sistem hukum dan sistem ideologi yang manipulative untuk memperkuat legitimasi; dan (4) pelaksanaan sistem pengetahuan, system politik, sistem hukum dan ideologi secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya. Akhirnya yang terjadi ialah dikotomi, yaitu masyarakat yang berkuasa dan manusia yang dikuasai. Untuk membebaskan situasi menguasai dan dikuasai, maka harus dilakukan pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang lemah (*empowerment of the powerless*).

Alur pikir di atas sejalan dengan terminologi pemberdayaan itu sendiri atau yang dikenal dengan istilah *empowerment* yang berawal dari kata daya (*power*). Daya dalam arti kekuatan yang berasal dari dalam tetapi dapat diperkuat dengan unsur-unsur penguatan yang diserap dari luar. Ia merupakan sebuah konsep untuk memotong lingkaran setan yang menghubungkan power dengan pembagian kesejahteraan. Keterbelakangan dan kemiskinan yang muncul dalam proses pembangunan disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam pemilikan atau akses pada sumber-sumber power. Proses historis yang panjang menyebabkan terjadinya *power dis empowerment*, yakni peniadaan power pada sebagian besar masyarakat, akibatnya

masyarakat tidak memiliki akses yang memadai terhadap akses produktif yang umumnya dikuasai oleh mereka yang memiliki power. Pada gilirannya keterbelakangan secara ekonomi menyebabkan mereka makin jauh dari kekuasaan. Begitulah lingkaran setan itu berputar terus. Oleh karena itu, pemberdayaan bertujuan dua arah. Pertama, melepaskan belenggu kemiskinan, dan keterbelakangan. Kedua, memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur ekonomi dan kekuasaan.

Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Menurut Prijono dan Pranarka (1996: 55), dalam konsep pemberdayaan, manusia adalah subyek dari dirinya sendiri. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal.

Menurut Sumodiningrat (1999: 7), bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat

sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.

Mubyarto (1998: 23) menekankan bahwa terkait erat dengan pemberdayaan ekonomi rakyat. Dalam proses pemberdayaan masyarakat diarahkan pada pengembangan sumberdaya manusia (di pedesaan), penciptaan peluang berusaha yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Masyarakat menentukan jenis usaha, kondisi wilayah yang pada gilirannya dapat menciptakan lembaga dan system pelayanan dari, oleh dan untuk masyarakat setempat. Upaya pemberdayaan masyarakat ini kemudian pada pemberdayaan ekonomi rakyat.

Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Suatu masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental, terdidik dan kuat, tentunya memiliki keberdayaan yang tinggi.

Keberdayaan masyarakat merupakan unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan, dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat itu sendiri menjadi sumber dari apa yang di dalam wawasan politik disebut sebagai ketahanan nasional. Artinya bahwa apabila masyarakat memiliki kemampuan ekonomi yang tinggi, maka hal tersebut merupakan bagian dari ketahanan ekonomi nasional.

Dalam kerangka pikir inilah upaya memberdayakan masyarakat pertama-tama haruslah dimulai dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena kalau demikian akan punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu sendiri, dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Selanjutnya, upaya tersebut diikuti dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Dalam konteks ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana yang kondusif. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses kepada berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya.

Dengan demikian, pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, kebertanggungjawaban dan lain-lain yang merupakan bagian pokok dari upaya pemberdayaan itu sendiri.

Pemberdayaan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pemberdayaan sektor informal, khususnya kelompok pedagang kaki lima

sebagai bagian dari masyarakat yang membutuhkan penanganan/pengelolaan tersendiri dari pihak pemerintah yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya yang mereka miliki yang pada gilirannya akan mendorong peningkatan pendapatan/profit usaha sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap penerimaan pendapatan daerah dari sektor retribusi daerah.

Azis dalam Alfitri (2011: 26) memberikan panduan tahapan pemberdayaan sebagai berikut, pertama, membantu masyarakat menemukan masalahnya; kedua, melakukan analisis masalah tersebut secara mandiri; ketiga, menentukan skala prioritas masalah; keempat, mencari solusi atas masalah; kelima, implementasi penyelesaian masalah; keenam, evaluasi.

D. Pengertian Masyarakat

Dalam bahasa Inggris masyarakat adalah '*society*', yang berasal dari kata '*socius*', artinya kawan; sedangkan kata masyarakat berasal dari bahasa Arab yaitu '*Syirk*', artinya bergaul. Adanya saling bergaul ini tentu ada bentuk-bentuk aturan hidup, yang bukan disebabkan oleh manusia seseorang, melainkan oleh unsur-unsur kekuatan lain dalam lingkungan sosial yang merupakan kesatuan. Manusia mulai dari lahir dan sampai mati sebagai anggota masyarakat, mereka saling berinteraksi, karena mempunyai nilai-nilai, norma, cara-cara dan prosedur yang merupakan kebutuhan bersama. Demikian, bahwa hidup dalam masyarakat berarti adanya interaksi sosial dengan orang-orang disekitar dan dengan demikian mengalami pengaruh dan

mempengaruhi orang lain. Interaksi sosial sangat utama dalam setiap masyarakat.

Dengan demikian dapatlah dikemukakan bahwa masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat-istiadat tertentu yang bersifat continue dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama.

Menurut Soetomo (2011: 25), masyarakat adalah sekumpulan orang yang saling berinteraksi secara continue, sehingga terdapat relasi sosial yang terpola, terorganisasi. Manusia, baik sebagai individu maupun sebagai warga masyarakat mempunyai kebutuhan dapat bersifat individual atau kolektif. Konsekuensinya, selalu ada upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Dengan perkataan lain dengan perencanaan pembangunan itu masyarakat hendak menentukan sendiri nasibnya, baik yang dialami sekarang maupun dimasa yang akan datang.

Sebenarnya suatu masyarakat, merupakan suatu bentuk kehidupan bersama manusia, yang mempunyai ciri-ciri pokok, sebagai berikut:

1. Manusia yang hidup bersama secara teoritis, maka jumlah manusia yang hidup bersama ada dua orang. Didalam ilmu-ilmu sosial, khususnya sosiologi, tidak ada suatu ukuran yang mutlak ataupun angka yang pasti untuk menentukan berapa jumlah manusia yang harus ada
2. Bergaul selama jangka waktu yang cukup lama

3. Adanya kesadaran, bahwa setiap manusia merupakan bagian dari suatu kesatuan
4. Adanya nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi patokan bagi perilaku yang dianggap pantas
5. Menghasilkan kebudayaan dan mengembangkan kebudayaan tersebut.

Dalam arti luas yang dimaksud masyarakat ialah keseluruhan hubungan-hubungan dalam hidup bersama dengan tidak dibatasi oleh lingkungan, bangsa dan lain-lain. Atau keseluruhan dari semua hubungan dalam hidup bermasyarakat.

Dalam arti sempit masyarakat dimaksud sekelompok manusia yang dibatasi oleh aspek-aspek tertentu misalnya: teritorial, bangsa, golongan dan sebagainya. Maka ada masyarakat Jawa, masyarakat sunda, masyarakat Minang dan lain-lain.

Berdasarkan arti tersebut diatas, Soetomo (2011: 89) menarik satu definisi sebagai berikut: “Masyarakat adalah kelompok manusia yang saling berinteraksi, yang memiliki prasarana untuk mencapai tujuan bersama. Masyarakat adalah tempat kita bisa melihat dengan jelas proyeksi individu sebagai (input) bagi keluarga. Keluarga sebagai tempat terprosesnya, dan masyarakat adalah tempat kita melihat hasil (*output*) dari proyeksi tersebut.

E. Pengertian Desa

Kata desa sendiri berasal dari bahasa India yakni “*swadesi*” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta

memiliki batas yang jelas. Sesuai batasan definisi tersebut, maka di Indonesia dapat ditemui banyak kesatuan masyarakat dengan peristilahannya masing-masing seperti Dusun dan Marga bagi masyarakat Sumatera Selatan, Dati di Maluku, Nagari di Minang atau Wanua di Minahasa. Pada daerah lain masyarakat setingkat desa juga memiliki berbagai istilah dan keunikan sendiri baik mata pencaharian maupun adat istiadatnya.

Menurut Hardjatno (2007:23) definisi umum desa adalah sebuah aglomerasi permukiman di wilayah perdesaan. Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administrative di bawah Kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa. Menurut Poerwadarminta (2009) Desa adalah sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan, kampung (di luar kota) dusun atau udik (dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan dari kota). Berdasarkan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, di mana Desa atau yang disebut dengan nama lain (selanjutnya disebut desa), adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa adalah sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan, kampung (di luar kota); dusun atau udik (dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan dari kota) (Poerwadarminta, 1976). Desa merupakan suatu daerah hukum yang merupakan wilayah masyarakat hukum

terbentuk atas dasar ikatan tertentu, antara lain: (1) bentuk genealogis, (2) bentuk “teritorial” dan (3) bentuk campuran keduanya.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Desa di Indonesia pertama kali ditemukan oleh Mr. Herman Warner Muntinghe, seorang Belanda anggota Raad van Indie pada masa penjajahan kolonial Inggris, yang merupakan pembantu Gubernur Jenderal Inggris yang berkuasa pada tahun 1811 di Indonesia. Dalam sebuah laporannya tertanggal 14 Juli 1817 kepada pemerintahnya disebutkan tentang adanya desa-desa di daerah-daerah pesisir utara Pulau Jawa. Dan dikemudian hari ditemukan juga desa-desa di kepulauan luar Jawa yang kurang lebih sama dengan desa yang ada di Jawa.

Terbentuknya suatu desa tidak terlepas dari insting manusia, yang secara naluriah ingin hidup bersama keluarga suami/ istri dan anak, serta sanak familinya, yang kemudian lazimnya memilih suatu tempat kediaman bersama. Tempat kediaman tersebut dapat berupa suatu wilayah dengan berpindah-pindah terutama terjadi pada kawasan tertentu hutan atau areal lahan yang masih memungkinkan keluarga tersebut berpindah-pindah. Hal ini

masih dapat ditemukan pada beberapa suku asli di Sumatera seperti kubu, suku anak dalam, beberapa warga melayu asli, juga di pulau-pulau lainnya di Nusa Tenggara, Kalimantan dan Papua.

Setidaknya ada tiga alasan pokok dari semula orang-orang membentuk masyarakat adalah: (1) untuk hidup, yaitu mencari makan, pakaian dan perumahan; (2) untuk mempertahankan hidupnya terhadap berbagai ancaman dari luar; dan (3) untuk mencapai kemajuan dalam hidupnya. Desa pertanian merupakan gejala desa pertama-tama dibentuk, setelah membuka hutan dan mengolah lahan untuk ditanami tumbuhan yang menghasilkan makanan dan bahan kebutuhan lainnya. Di tepi laut dan sungai-sungai besar terbentuk desa-desa perikanan dan pelayaran (masyarakat pesisir) yang mendapat pencahariannya dari menangkap ikan, tambak dan jasa pelayaran.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya, kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis.

Menurut Sugiyono (2003: 34) mengatakan bahwa penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel dengan variabel yang lain. Penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi didalam masyarakat, pertentangan 2 keadaan/lebih, hubungan antarvariabel, perbedaan antar fakta, pengaruh terhadap suatu kondisi, dan lain-lain.

Sedangkan metode kualitatif deskriptif yang ditetapkan oleh Arikunto (2005 :65) adalah untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Tujuan dari kualitatif deskriptif yaitu membuat penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam arti ini pada penelitian deskriptif tidak perlu mencari atau

menerangkan saling hubungan antar komporasi, sehingga juga tidak memerlukan hipotesis.

Dengan demikian penelitian kualitatif tidak bekerja dengan menggunakan data dalam bentuk atau ditransformasikan menjadi bilangan atau angka, tidak boleh dengan rumus dan tidak ditafsirkan/ diinterpretasikan sesuai dengan ketentuan statistik atau matematik, secara umum metode deskriptif bertugas untuk melakukan representatif objek mengenai gejala-gejala yang terdapat didalam penelitian.

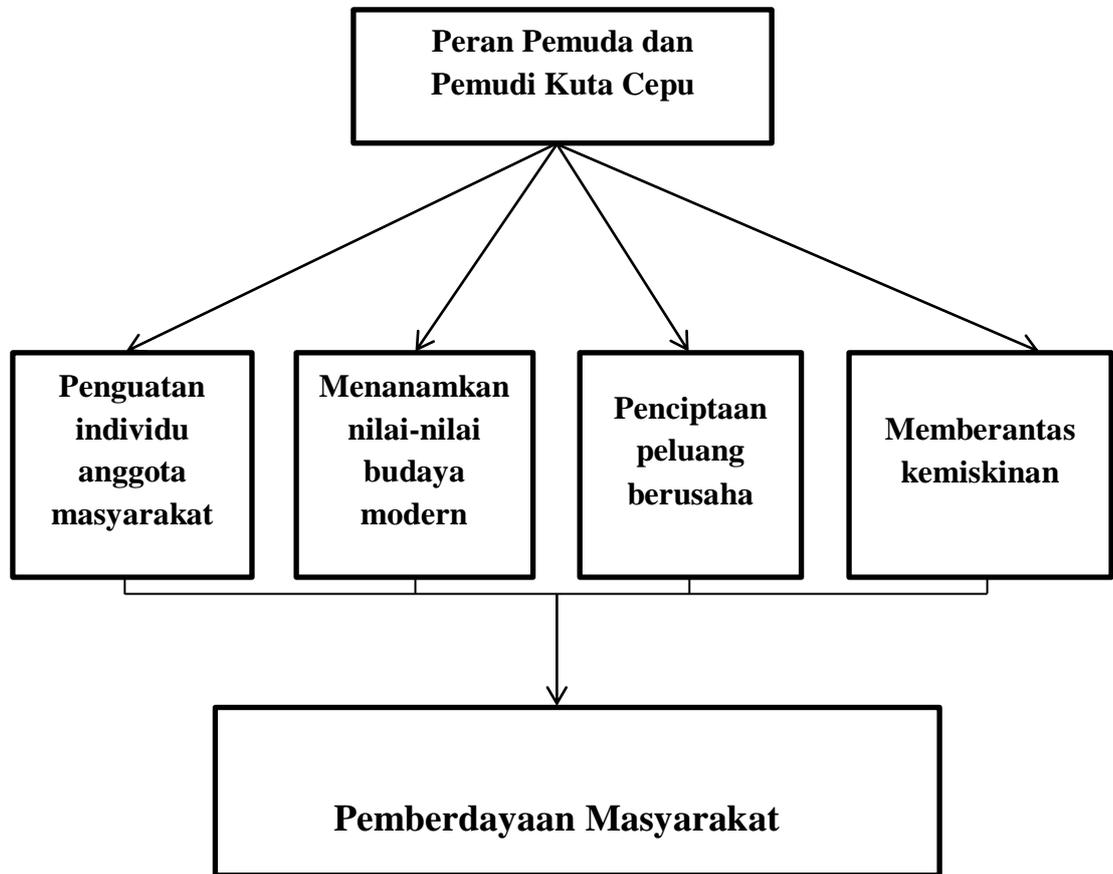
B. Kerangka Konsep

Berdasarkan judul penelitian, Peran Persatuan Pemuda Dan Pemudi Kuta Cepu (P3KC) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Kuta Cepu Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam. Nawawi (1992:43), menyatakan kerangka konsep itu disusun sebagai perkiraan teoritis dari hasil yang dicapai setelah di analisis secara kritis berdasarkan persepsi yang dimiliki. Konsep juga penggambaran dan mempermudah terhadap suatu yang hendak diteliti.

Menurut Singarimbun (1995:57), konsep adalah penggambaran secara tepat fenomena yang hendak diteliti yakni istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, kelompok, atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Konsep adalah cara yang mempermudah peneliti melalui penggambaran secara tepat fenomena yang terjadi.

Sedangkan menurut Sugiarto (2009:49) kerangka konseptual merupakan hasil identifikasi yang sistematis dan analisis yang kritis dari penelitian

berdasarkan hasil kajian kepustakaan dan pengamatan awal. Sebagai dasar pijakan yang jelas dan pengembangan teori, maka konsep dapat digambarkan:



C. Definisi Konsep

Konsep adalah sebagai ide-ide, penggambaran hal-hal atau benda-benda, gejala sosial yang dinyatakan didalam istilah atau kata konsep terbentuk dengan gejala interaksi digandalisasi. Adapun definisi konsepnya adalah sebagai berikut:

1. Peran adalah tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial.
2. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai social

D. Kategorisasi

1. Peran, kategorisasinya :
 - a. Dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat di perlukan adanya peran Pemuda dan Pemudi Kuta Cepu agar tidak terjadi salah sasaran terhadap pemberian program ini
 - b. Dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat, Pemuda dan Pemudi Kuta Cepu mempunyai tugas dalam menjalankan program dari pemberdayaan masyarakat.
2. Pemberdayaan Masyarakat, kategorisasinya :
 - a. Program pokok yang harus di laksanakan dalam program ini adalah penguatan individu anggota masyarakat, menanamkan nilai-nilai budaya modern, penciptaan peluang berusaha, serta memberantas kemiskinan.

E. Narasumber

1. Pengurus P3KC : Firmansyah dan Muliadi
2. Total Masyarakat : Abdul Saleh
3. Total Agama : H. Azmanudin S.Pdi
4. Masyarakat :
 - a. Dusun Muara Serkea : Safrawi dan Mawardi
 - b. Dusun Barisan : Arifin Bako dan Karidin
 - c. Dusun Pangkalan : Saiman dan Mustafa
 - d. Dusun Lae Beter : Abdul Rahmat dan Handal

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

1. Data Primer, adapun yang menjadi langkah dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan wawancara, yaitu mengajukan beberapa pertanyaan terhadap narasumber/responden yang berkaitan dalam penelitian
2. Data sekunder, merupakan hasil pengumpulan data yang diteliti yang mempelajari berbagai literature, buku-buku, dokumen-dokumen, maupun catatan tertulis yang relevan dengan masalah yang diteliti.

Menurut Sugiyono (2013:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, maka peneliti mengumpulkan data dengan cara:

1. Observasi/pengamatan, yaitu pengamatan secara langsung dari subjek yang akan diteliti dilapangan dalam hal Peran Persatuan Pemuda Dan Pemudi Kuta Cepu (P3KC) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Kuta Cepu Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam.
2. Wawancara, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara (tanya jawab) secara lisan pada dua orang atau lebih dalam menggali informasi dengan tatap muka secara langsung untuk memperoleh keterangan dari masyarakat (responden) yang berperan dalam masalah yang diteliti. Wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang hanya membuat garis besar yang akan ditanyakan. Yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber bacaan atau buku-

buku tulisan ilmiah yang mempunyai relevansi langsung, literatur dan catatan-catatan perkuliahan.

3. Teknik Dokumentasi, dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

G. Teknik Analisis Data

Penganalisa data kualitatif diawali dengan analisis berbagai data yang berhasil dihimpun dari lapangan penelitian. Data tersebut dikumpulkan baik melalui observasi, wawancara mendalam (*dept interview*) maupun berupa dokumen-dokumen penting yang mendukung penelitian. Huberman & Miles dalam Idrus (2009: 148), mengajukan model analisis data yang disebut sebagai model interaktif. Model interaktif ini terdiri dari tiga hal utama, yaitu : reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.

Teknis yang digunakan dalam menganalisis data dapat divisualisasikan sebagai berikut:

Proses analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan empat tahap yaitu:

1. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif dan reflektif.

Catatan deskriptif adalah catatan alami, (catatan tentang apa yang dilihat, didengar, disaksikan dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti terhadap fenomena yang dialami. Catatan interaktif adalah catatan yang berisi kesan, komentar, pendapat, dan tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai, dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya.

2. Reduksi data

Setelah data terkumpul, selanjutnya dibuat reduksi data, guna memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah, penemuan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian menyederhanakan dan menyusun secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting tentang hasil temuan dan maknanya. Pada proses reduksi data, hanya temuan data atau temuan yang berkenaan dengan permasalahan penelitian saja yang direduksi. Sedangkan data yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian dibuang. Dengan kata lain reduksi data digunakan untuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak penting, serta mengorganisasikan data, sehingga memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan.

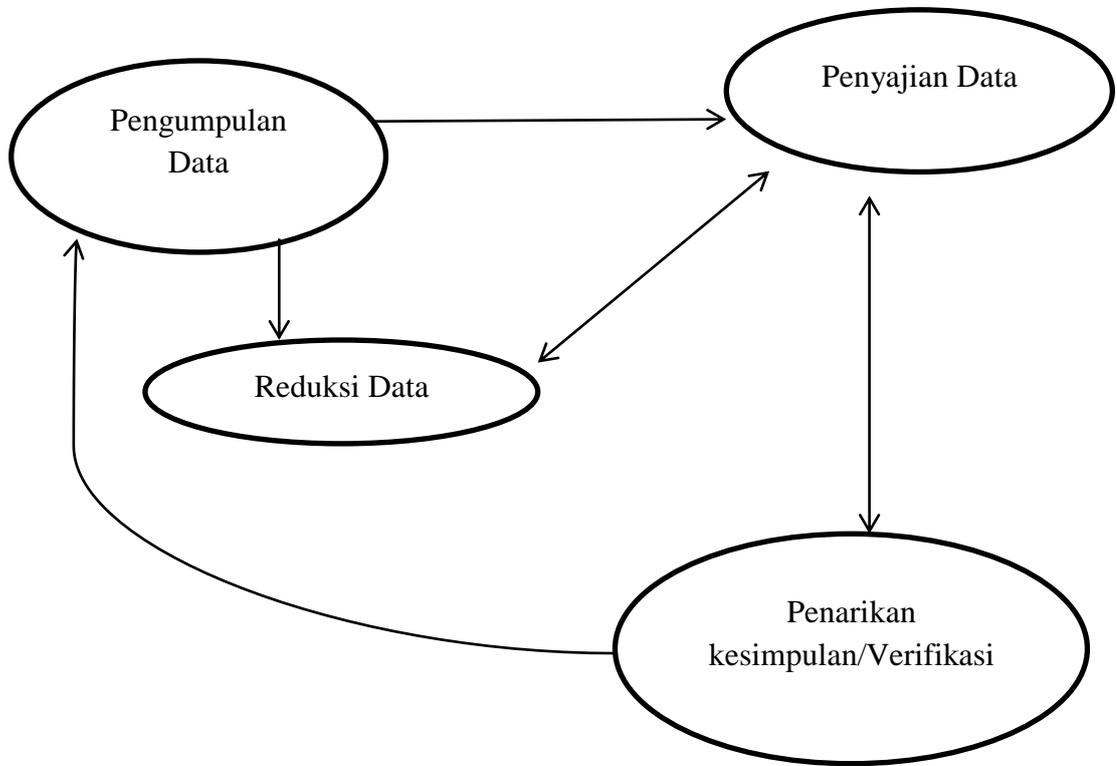
3. Penyajian Data

Penyajian data dapat berupa bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, grafik dan tabel. Tujuan sajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Dalam hal ini, agar peneliti tidak kesulitan dalam penguasaan informasi baik secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian, maka peneliti harus membuat naratif, matrik atau grafik untuk memudahkan penguasaan informasi atau data tersebut. Dengan demikian peneliti dapat tetap menguasai data dan tidak tenggelam dalam kesimpulan informasi yang dapat membosankan. Hal ini dilakukan karena data yang terpecah-pecah dan kurang tersusun dengan baik dapat mempengaruhi peneliti dalam bertindak secara ceroboh dan mengambil kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat dan tidak medasar. Untuk display data harus disadari sebagai bagian dalam analisis data.

4. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

Dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir. Sejak awal penelitian, peneliti selalu berusaha mencari makna data yang terkumpul. Untuk itu perlu mencari pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya. Kesimpulan-kesimpulan itu harus diklarifikasikan dan diverifikasikan selama penelitian berlangsung.

Gambar 3.1



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data

Pada penelitian ini, data dikumpulkan melalui dua tahapan pertama, pengumpulan data yang dilakukan secara sekunder yaitu data-data yang dikumpulkan dari buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal maupun catatan tertulis yang relevan dengan masalah yang diteliti. Kedua data primer yaitu data yang dikumpulkan dengan cara wawancara secara mendalam dilokasi penelitian yang dilakukan peneliti selama 14 hari. Penyajian data yang akan diteliti oleh peneliti didasarkan pada tiap-tiap kategorisasi yang sudah ditentukan, sehingga memudahkan dalam verifikasi data, analisis data, serta penarikan kesimpulan.

B. Hasil Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada tiap-tiap kategorisasi yang sudah ditentukan yakni peran, dan pemberdayaan masyarakat. Ada pun hasil penelitian yakni:

Ditinjau secara sosiologis, kehidupan sosial berlangsung dalam suatu wadah yang disebut masyarakat. Dalam konteks pemikiran sistem, masyarakat akan dipandang sebagai sebuah sistem sosial. Di satu sisi, pandangan ini selain menunjuk pada suatu satuan masyarakat yang besar, misalnya masyarakat desa, masyarakat kota atau masyarakat Indonesia juga merujuk pada satuan masyarakat yang kecil, seperti lembaga, organisasi, sekolah dan lain-lain. Sebuah sistem sosial juga dapat didefinisikan sebagai pola interaksi sosial yang terdiri dari komponen-komponen sosial yang teratur dan melembaga (*institutionalized*).

Salah satu karakteristik dari sistem sosial adalah merupakan kumpulan dari beberapa unsur atau komponen yang dapat ditemukan dalam kehidupan bermasyarakat. Kehidupan tersebut terdiri dari beberapa peran-peran sosial. Karakteristik dari sistem yang memperlihatkan bahwa adanya unsur-unsur atau komponen-komponen sistem yang saling berhubungan satu sama lain dan saling bergantung. Di dalam suatu masyarakat meskipun terdapat lebih dari satu lembaga biasanya terdapat satu lembaga yang berada dalam kedudukan teratas dan mendominasi lembaga-lembaga lainnya. Bagi masyarakat desa, lembaga-lembaga dominan ini bisa diwakili oleh lembaga adat maupun lembaga pemerintahan. Besarnya peranan lembaga pemerintahan itu berbeda pada semua desa. Pada desa dengan ikatan *genealogis* peranan lembaga pemerintahan ini tidak terlalu besar karena sistem kekerabatan dengan aturan adat istiadatnya sangat mendominasi kehidupan masyarakat desa ini. Sedangkan pada desa dengan ikatan kedaerahan peranan lembaga pemerintahan cukup besar.

Setiap lembaga yang dibentuk di tengah-tengah masyarakat memiliki peran. Peran tersebut akan berjalan sesuai dengan fungsi yang diharapkan masyarakat terhadapnya. Parsons dalam (Ritzer, 2007:125) menjelaskan sejumlah persyaratan fungsional yang dibentuk dalam lingkungan bermasyarakat, diantaranya menyebutkan bahwa sistem yang telah dibentuk tersebut harus mendapat dukungan dari sistem yang lain agar dapat melanjutkan fungsinya. Seperti halnya lembaga-lembaga sosial yang ada di Desa Kuta Cepu Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa

Kuta Cepu Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam adalah Persatuan Pemuda Dan Pemudi Kuta Cepu (P3KC).

Dalam pelaksanaan suatu peran diperlukan adanya proses internalisasi dan sosialisasi. Pada proses sosialisasi yang berhasil, norma dan nilai menjadi bagian dari suatu lembaga tersebut. Persatuan Pemuda Dan Pemudi Kuta Cepu (P3KC) yang terdapat di lingkungan masyarakat Desa Kuta Cepu memiliki peran di dalam proses perkembangannya di desa. Peran (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Suatu peran mencakup paling sedikit tiga hal, yaitu: peran meliputi aturan-aturan yang dihubungkan dengan posisi lembaga di lingkungan bermasyarakat; peran merupakan suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh suatu lembaga di lingkungan masyarakat; peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu-individu yang menjadi bagian dari suatu lembaga kemasyarakatan.

Berjalannya peran Persatuan Pemuda Dan Pemudi Kuta Cepu (P3KC) di Desa Kuta Cepu dapat dilihat dari kinerja serta kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dengan lancar di dalam pelaksanaannya. Berdasarkan keputusan yang ditetapkan bersama, Persatuan Pemuda Dan Pemudi Kuta Cepu (P3KC) di Desa Kuta Cepu mempunyai tugas, yaitu: menyusun rencana pembangunan yang partisipatif, menggerakkan swadaya dan gotong-royong masyarakat serta melaksanakan, mengendalikan, dan mengawasi pembangunan.

1. Menyusun Rencana Pembangunan yang Partisipatif

Perencanaan adalah proses pemikiran dan penentuan secara matang mengenai hal-hal yang akan dikerjakan selanjutnya. Sejalan dengan pengertian

tersebut, perencanaan merupakan suatu kerangka kerja yang menguraikan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memperoleh tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan pembangunan desa sesuai dengan hakekat pengertian pembangunan desa yaitu perencanaan pembangunan dari, oleh, dan untuk masyarakat desa. Desa adalah subjek pembangunan, namun dalam pelaksanaannya masih perlu bimbingan dan bantuan pemerintah yang lebih tinggi. Dengan demikian berarti perencanaan pembangunan harus dilaksanakan oleh desa sendiri, bukan oleh pemerintah yang lebih tinggi. Melalui proses ini maka keinginan-keinginan dan kebutuhan masyarakat desa dapat disalurkan. Dalam hal ini Kepala Desa Kuta Cepu sebagai pimpinan desa merupakan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk itu Kepala Desa harus mampu menggerakkan seluruh kalangan masyarakat desa untuk melaksanakan rencana yang telah ditetapkan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Badan Perwakilan Desa. Di dalam menggerakkan masyarakat desa, diperlukan suatu arahan dalam bentuk rencana kegiatan dari pelaksanaan pembangunan. Rencana tersebut ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Di dalam merencanakan pembangunan di Desa Kuta Cepu semua pihak ikut dilibatkan, baik itu pihak Pemerintah Desa, Kecamatan maupun masyarakat desa itu sendiri. Pelibatan anggota masyarakat diawali dengan proses musyawarah yang selalu diadakan di desa. Maksud dari musyawarah tersebut agar semua lapisan masyarakat dapat ikut berpartisipasi, baik itu dalam hal perencanaan maupun pelaksanaan dengan tidak membeda-bedakan status dari masyarakat desa tersebut.

Hal ini berdasarkan penuturan Bapak Firmansyah:

“Musyawarah yang diadakan di Desa Kuta Cepu dimaksudkan biar semua warga ikut andil. Baik itu perempuan, laki-laki, para lajang-lajang kampung ini semua diajak ikut serta. Dengan begitu kan penduduk desa jadi merasa dibutuhkan untuk kegiatan pembangunan desanya.”

(Wawancara Selasa, 7 Februari 2018)

Perencanaan pembangunan adalah kegiatan yang bersifat menyeluruh, karena perencanaan itu dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah desa yang cukup kompleks. Proses pengkajian yang harus dilakukan dalam menyusun suatu perencanaan pembangunan desa meliputi berbagai hal, antara lain: keadaan potensi fisik desa yang terdiri dari: penggunaan tanah, tingkat kesuburan tanah, prasarana dan saran yang tersedia; kependudukan, terdiri dari: jumlah penduduk, tingkat kepadatan dan pertumbuhan, usia sekolah, usia produktif; sosial budaya masyarakat desa; ekonomi masyarakat desa; sumber daya alam lainnya (Adisasmita, 2006: 54-58).

Data-data tersebut pada sebagian besar desa tercermin pada potensi desa yang terus-menerus dikembangkan dan dibina oleh Pemerintah Desa. Berkenaan dengan pentingnya data-data tersebut untuk rencana pembangunan desa maka Pemerintah Desa perlu mencatat secara teliti, cermat dan benar. Kebenaran data sangat diperlukan agar rencana yang disusun dapat diterima dan realistis untuk dilaksanakan, menguntungkan serta dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat desa. Untuk meminimalisir permasalahan yang akan dihadapi dalam pembangunan desa, maka sebelum menetapkan perencanaan pembangunan desa terlebih dahulu harus dilakukan: Identifikasi masalah adalah kegiatan pertama dari unsur perencanaan pembangunan desa. Tugas inventarisasi dari identifikasi

masalah ini adalah tugas dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Masalah yang perlu diperhatikan dari kegiatan ini adalah keadaan masa lalu, keadaan sekarang dan kecenderungan-kecenderungan di masa yang akan datang. Langkah selanjutnya setelah identifikasi masalah dilakukan adalah kegiatan pengumpulan data yang mempunyai kaitan dengan faktor-faktor yang diperlukan dalam penyusunan rencana pembangunan desa. Data-data tersebut diperoleh berdasarkan data-data yang tertuang dalam papan potensi desa yang dijamin kebenarannya. Langkah berikut setelah pengumpulan data adalah analisa data. Data-data disistematiskan, disusun sebagai suatu rencana, disusun sesuai urutan prioritas pembangunan. Langkah-langkah sistematis dalam penyusunan rencana pembangunan desa dilakukan melalui penjenisan rencana sesuai dengan tingkatannya. Dengan telah ditetapkan urutan prioritas permasalahan yang harus diselesaikan melalui serangkaian kegiatan pembangunan maka dapat disusun sasaran-sasaran yang akan dicapai. Dalam penentuan sasaran harus pula diperhatikan faktor-faktor pendukung agar dapat berjalan lancar, seperti: Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia serta faktor penghambat, seperti: sulitnya transportasi, pengetahuan yang belum memadai dari aparat yang terlibat dalam perencanaan pembangunan desa tersebut.

Kegiatan rutin yang dilakukan tiap bulan di Desa Kuta Cepu adalah musyawarah di balai desa. Musyawarah yang dilakukan tiap awal bulan ini membahas tentang bagaimana rencana jangka pendek yang perlu dilaksanakan, baik itu dari pengembangan sistem pertanian (merupakan sumber mata pencaharian tetap pada masyarakat sekitar), pemeliharaan sarana dan prasarana

desa maupun kegiatan proyek desa. Selain itu di dalam musyawarah tersebut akan dibahas masalah yang dihadapi oleh masing-masing wilayah dusun untuk dapat dicari jalan keluarnya. Dalam musyawarah tersebut seluruh komponen masyarakat turut mengambil bagian dalam hal pelaporan, termasuk hasil dari keputusan dari musyawarah yang telah dilakukan sebelumnya.

Dalam musyawarah yang dilakukan di Desa Kuta Cepu membahas mengenai pembangunan infrastruktur yang dilakukan langsung oleh masyarakat, dengan cara bergotong-royong. Artinya, segala dana dan pengeluaran yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur tersebut adalah berasal dari masyarakat setempat melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Perbaikan jalan-jalan desa, sampai pada upaya-upaya yang akan dilakukan untuk memberdayakan pemuda-pemuda setempat. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Firmansyah:

“Dalam musyawarah yang dilakukan tiap bulannya akan dirundingkan mengenai masalah dana dan pengeluaran dalam semua program-program yang menunjang proses pembangunan desa.”

(Wawancara Selasa, 7 Februari 2018)

Pernyataan Bapak Firmansyah tersebut diperkuat oleh pernyataan dari Bapak Musliadi berikut ini:

“Tiap pelaksanaan kegiatan pembangunan masalah dana menjadi hal yang paling utama, makanya dalam musyawarah kami selalu membahas berapa jumlah dana yang kira-kira dibutuhkan dan darimana dana itu dapat didapat.”

(Wawancara Selasa, 7 Februari 2018).

Setelah diperoleh hasil musyawarah, biasanya masing-masing anggota Persatuan Pemuda Dan Pemudi Kuta Cepu (P3KC) diberikan tanggung jawab dalam menggerakkan swadaya masyarakat desa di lingkup wilayahnya masing-masing. Dalam menggerakkan swadaya masyarakat ini, anggota Persatuan Pemuda Dan Pemudi Kuta Cepu (P3KC) akan melakukan beberapa cara. Cara umum yang dilakukan adalah dengan mendatangi langsung lokasi-lokasi yang sering dijadikan oleh penduduk Desa Kuta Cepu sebagai tempat *ngumpul*. Ketika menjawab pertanyaan peneliti tentang bagaimana cara anggota pengurus Persatuan Pemuda Dan Pemudi Kuta Cepu (P3KC) mengajak masyarakat desa, Bapak Musliadi menyatakan:

“Kami sebagai anggota Persatuan Pemuda Dan Pemudi Kuta Cepu (P3KC) mengajak penduduk desa untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan yang akan dilakukan, biasanya kami datangi warung-warung yang banyak orang ngumpul. Yang penting sebisanya warga ikut membantu.”

(Wawancara Selasa, 7 Februari 2018)

Sementara itu, dalam musyawarah bulanan yang dilaksanakan oleh Persatuan Pemuda Dan Pemudi Kuta Cepu (P3KC) di Desa Kuta Cepu dibahas mengenai petani yang mempunyai lahan perkebunan kelapa sawit sendiri dan pekerja yang menjadi buruh harian di perkebunan milik perorangan tersebut. Mengupayakan bagaimana supaya kehidupan ekonomi sosial masyarakat asli desa tersebut tetap berjalan stabil agar kehidupan bermasyarakat berjalan semestinya, seperti layaknya kehidupan bermasyarakat di desa yang masih identik dengan

sistem gotong-royong dan rasa kekeluargaan diantara sesama masyarakat terjaga dengan baik, sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial.

Dalam musyawarah per-bulan di desa, Persatuan Pemuda Dan Pemudi Kuta Cepu (P3KC) juga berperan dalam meninjau harga-harga jual hasil kebun itu ke pengasok atau pengumpul, karena naik turunnya harga hasil kebun sangat berpengaruh dengan pendapatan penduduk dan desa.

Dengan kondisi alam dan potensi yang dimiliki Desa Kuta Cepu menjadikan wilayah desa ini sebagai daerah perkebunan. Banyak ditemukan perkebunan yang dikelola oleh pemerintah, swasta maupun perseorangan. Pembangunan Desa Kuant Cepu dapat terus berjalan hingga sekarang juga dapat dikatakan merupakan wujud kepedulian perusahaan-perusahaan perkebunan yang ditemukan di sekitar wilayah desa. Dengan penyusunan rencana/ program pembangunan secara terarah dan serasi terhadap kebutuhan masyarakat dan pelaksanaan (implementasi) program pembangunan secara efektif dan efisien, berarti distribusi dan alokasi faktor-faktor produksi dapat dilaksanakan secara optimal, demikian pula pencapaian sasaran peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat, perluasan lapangan kerja atau pengurangan pengangguran, berkembangnya kegiatan lokal baru, peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat, peningkatan keswadayaan dan partisipasi masyarakat akan terwujud secara optimal pula.

2. Menggerakkan Swadaya Masyarakat

Untuk menggerakkan masyarakat desa, diperlukan suatu arahan dalam bentuk rencana kegiatan dari pelaksanaan pembangunan. Rencana tersebut

ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. Selain melakukan program perencanaan pembangunan desa dengan dana yang bersumber dari Pemerintah atau desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat juga bertanggung jawab terhadap program rencana pembangunan desa yang bersumber dari dana swadaya masyarakat.

Rencana pembangunan yang diprogramkan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang pembiayaannya berasal dari dana swadaya masyarakat ini biasanya dalam proyek-proyek pembangunan kecil yang dianggap mampu dibiayai dari swadaya masyarakat desa sendiri. Misalnya adalah perbaikan jalan penghubung antar dusun yang bermasalah, perbaikan parit-parit di setiap dusun yang dikarenakan tidak lancarnya air parit mengalir serta perawatan irigasi yang telah dibangun oleh pihak Kecamatan untuk areal persawahan penduduk desa. Mengenai pembiayaan yang diperlukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Pembiayaan program pembangunan yang dilaksanakan di desa ini dari Anggaran Pembiayaan Pengeluaran Kebutuhan Desa (APPKD) yang dikumpulkan. APPKD itu berasal dari hasil penjualan sawit dan karet wilayah desa, pengumpul hasil ataupun penjual hasil sawit dan karet dan hasil-hasil penjualan barang galian jenis C di Desa Kuta Cepu ini, contohnya: di daerah Dusun X banyak batu padas (batu alam), penggali batu pada tersebut berkewajiban membayar ke kas desa. Tapi, dalam pelaksanaannya lebih banyak dari dana sukarela dan donatur di desa ini.”

Apabila Anggaran Pembiayaan Pengeluaran Kebutuhan Desa (APPKD) masih belum mencukupi untuk melaksanakan pembangunan desa, maka anggota Persatuan Pemuda Dan Pemudi Kuta Cepu (P3KC) bersama-sama mengumpulkan

dana di lokasi pelaksanaan kegiatan berlangsung atau memusyawarakannya kembali dengan masyarakat desa. Berikut ini hasil wawancara Bapak Musliadi dengan peneliti yang menyatakan:

“Kalau pengumpulan dana di desa ini dilakukan secara sukarela, tidak pernah dipatokkan harus ngasih berapa atau tidak mau ngasih juga tidak masalah. Penduduk desa ini tidak dipaksa. Biasanya saya sering membantu dalam hal penyediaan dana untuk perayaan di desa, mau itu pada saat hari-hari besar atau hiburan untuk penduduk desa.”

(Wawancara Selasa, 7 Februari 2018)

Pernyataan Bapak Musliadi diperkuat oleh pernyataan Ibu Siti yang menjelaskan:

“Pengumpulan uang di desa yang dipatokkan perbulannya hanya untuk kegiatan STM. Biasanya dikumpulkan dari rumah ke rumah. Kalau dana untuk kegiatan pembangunan desa biasanya dikumpulkan kalau memang uangnya kurang, itupun biasanya dikumpulkan di tempat berlangsungnya kegiatan. Jadi gak ada paksaan.”

(Wawancara Selasa, 7 Februari 2018)

Kegiatan pengumpulan dana akan dilakukan apabila dana yang tersedia dari APPKD tidak mencukupi. Namun beberapa kasus pembangunan di Desa Kuta Cepu menyebutkan tidak sedikit pembangunan yang dibiayai oleh donatur. Adapun yang menjadi donatur dalam kegiatan tersebut adalah penduduk Desa Kuta Cepu itu sendiri. Berdasarkan dari penuturan beberapa informan, di Desa Kuta Cepu terdapat beberapa orang yang bersedia menjadi donatur dalam

pelaksanaan suatu kegiatan pembangunan Desa Kuta Cepu. Hal ini dikutip dari wawancara dengan Bapak Firmansyah menyatakan:

“Di Desa ini ada beberapa donatur yang langsung membantu pendanaan kegiatan, walaupun tidak semua namun cukup membantu. Kami tidak pernah memaksakan. Kalau memang dana terbatas pembangunan juga akan dilaksanakan tapi gak seperti rencana sebelumnya, misalnya pembuatan parit-parit yang rencananya mau disemen kalau dana pas-pasan yang disemen hanya batas pinggir jalan dengan parit aja.”

(Wawancara Selasa, 7 Februari 2018)

Kegiatan menggerakkan swadaya masyarakat akan berhubungan langsung dengan partisipasi masyarakat. Pentingnya partisipasi masyarakat dikarenakan kebutuhan masyarakat di suatu desa akan terlaksana dengan adanya partisipasi aktif masyarakat. Seperti halnya desa lain di Indonesia, pembangunan di Desa Kuta Cepu merupakan wujud dari partisipasi yang ada di masyarakat. Masyarakat sebagai salah satu unsur utama di dalam pembangunan saat ini semakin dituntut peran sertanya. Sebenarnya sudah sejak lama berkembang berbagai model pembangunan partisipatif yang melibatkan masyarakat bahkan menempatkan masyarakat sebagai pelaku sentral dari pembangunan yang sedang dan akan berlangsung, namun dalam penerapannya masih banyak terdapat kelemahan.

Dengan demikian maka partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangatlah diperlukan karena selain efektif untuk menjalankan program pembangunan juga akan efisien dan sesuai dengan skala prioritas pembangunan yg sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Midgley (1986) menyatakan bahwa

partisipasi bukan hanya sekedar salah satu tujuan dari pembangunan sosial tetapi merupakan bagian yang integral dalam proses pembangunan sosial. Partisipasi masyarakat berarti eksistensi manusia seutuhnya.

Partisipasi yang keliru adalah melibatkan masyarakat dalam pembangunan hanya untuk didengar suaranya tanpa betul-betul memberi peluang bagi mereka untuk ikut mengambil keputusan. Pengambilan keputusan yang partisipatif tidak selalu harmonis dan seringkali ada banyak prioritas yang harus dipilih, oleh sebab itu mekanisme resolusi konflik kepentingan harus dikuasai oleh pemerintah guna mengelola ketidak-sepakatan.

Pada kondisi Desa Kuta Cepu yang peneliti amati, bentuk partisipasi yang terdapat di tengah-tengah masyarakat desa adalah partisipasi secara langsung dan partisipasi dengan perwakilan. Penduduk desa ikut berpartisipasi secara langsung dalam hal pembentukan lembaga yang dapat membantu proses pembangunan di desanya, sementara itu dengan bentuk partisipasi secara perwakilan penduduk desa memilih beberapa orang dari anggota masyarakat untuk dapat menggerakkan serta mengkoordinir jalannya proses pembangunan desa yang diharapkan dan mengikut sertakan masyarakat desa dalam setiap perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan tersebut.

Partisipasi dalam (Soekanto, 2007) merupakan setiap proses identifikasi atau menjadi peserta, suatu proses komunikasi atau kegiatan bersama dalam suatu situasi sosial tertentu. Partisipasi sosial merupakan derajat partisipasi individu dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu bahwa tertariknya seseorang untuk melakukan interaksi ditentukan oleh prinsip atau asas saling melengkapi (*the*

principle of complementary), artinya seseorang tertarik untuk mengadakan interaksi bukan karena adanya kesamaan sikap, tetapi justru karena adanya perbedaan-perbedaan yang tercipta. Adanya perbedaan tersebut misalnya di dalam merasakan kekurangan diri sendiri dibandingkan dengan orang lain, justru akan mendorong seseorang tersebut untuk mendapatkan yang kurang itu dari orang lain. Dengan adanya partisipasi masyarakat maka kemungkinan gerak menuju proses perubahan sosial pun akan terjadi dan proses pembangunan akan terlaksana dengan baik. Masyarakat sebagai salah satu unsur utama di dalam pembangunan saat ini semakin dituntut peran sertanya. Sebenarnya sudah sejak lama berkembang berbagai model pembangunan partisipatif yang melibatkan masyarakat bahkan menempatkan masyarakat sebagai pelaku sentral dari pembangunan yang sedang dan akan berlangsung, namun dalam penerapannya masih banyak terdapat kelemahan.

Saat menjawab pertanyaan dari peneliti tentang bagaimana dengan partisipasi masyarakat yang bukan merupakan anggota pengurus Persatuan Pemuda Dan Pemudi Kuta Cepu (P3KC), Pak Firmansyah menjawab dengan pernyataan berikut:

“Penduduk desa yang bukan anggota pengurus Persatuan Pemuda Dan Pemudi Kuta Cepu (P3KC) juga ikut membantu kegiatan di desa, tidak menjadi masalah bagi penduduk apakah mereka adalah anggota atau bukan. Tapi, masalah yang dihadapi biasanya adalah waktu. Banyak dari penduduk sini yang berkebun atau terkadang sedang memanen hasil kebunnya jadi tidak bisa ikut gotong royong.”

(Wawancara Selasa, 7 Februari 2018)

Pernyataan tersebut diperkuat oleh pernyataan dari Pak Musliadi menyatakan: “Yang jadi masalah untuk gotong-royong biasanya waktu, apalagi saya yang mempunyai aktivitas rutin dan tidak bisa ditinggalkan pada saat-saat tertentu.”(Wawancara Selasa, 7 Februari 2018)

Mendorong timbulnya partisipasi pada masyarakat merupakan bagian kritis dari proses pengembangan masyarakat. Bagi orang-orang yang tidak ikut berpartisipasi, keputusan sadar untuk tidak berpartisipasi adalah hak orang tersebut. Hal ini akan sangat berbeda dengan non-partisipasi sebagai akibat dari kurangnya peluang atau dukungan untuk berpartisipasi, yang dalam hal ini merupakan kegagalan pada sistem dalam mewujudkan hak untuk berpartisipasi. Dengan demikian, mendorong partisipasi erat berkaitan dengan mewujudkan Hak Azasi Manusia. Kondisi-kondisi yang mendorong partisipasi adalah: pertama, orang akan berpartisipasi apabila mereka merasa bahwa isu atau aktivitas tersebut penting. Cara ini dapat secara efektif dicapai jika rakyat sendiri telah mampu menentukan isu atau aksi, dan telah menominasi kepentingannya; kondisi kedua bagi partisipasi adalah bahwa orang harus merasa bahwa aksi mereka akan membuat perubahan. Masyarakat mungkin telah menentukan pekerjaan sebagai prioritas utama, tetapi jika orang tidak percaya bahwa aksi masyarakat akan membuat perubahan terhadap prospek peluang kerja lokal, akan kecil insentif untuk berpartisipasi; berbagai bentuk partisipasi harus diakui dan dihargai; orang harus bisa berpartisipasi, dan didukung dalam partisipasinya. Hal ini berarti bahwa isu-isu seperti transportasi, keamanan, waktu dan lokasi kegiatan serta

lingkungan tempat kegiatan akan dilaksanakan sangatlah penting dan perlu diperhitungkan dalam perencanaan proses-proses berbasis masyarakat. Kegagalan melakukan hak tersebut akan berakibat beberapa bagian dari masyarakat (biasanya perempuan dan etnis atau ras minoritas) tidak dapat berpartisipasi, meskipun mereka ingin (Ife, 2006: 312).

Menurut beberapa informan yang penulis wawancarai di lapangan, mereka mengatakan bahwa mustahil pembangunan akan berjalan dengan lancar tanpa ditunjang oleh sumber daya manusia yang bagus dan berkualitas, untuk itu ada beberapa hal yang sangat esensial yang harus diperhatikan, salah satunya adalah perkembangan pemuda desa dan upaya-upaya untuk mendorong kreatifitas mereka. Persatuan Pemuda Dan Pemudi Kuta Cepu (P3KC) mengadakan pembinaan mental melalui kegiatan keagamaan seperti pengajian dan lain-lain. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Firmansyah menuturkan:

“Persatuan Pemuda Dan Pemudi Kuta Cepu (P3KC) di Desa Kuta Cepu tidak hanya bergerak di bidang pembangunan desa saja. Untuk bidang yang saya ketuai, saya sering bekerja sama dengan remaja-remaja mesjid setiap dusun untuk ikut bekerja sama dalam hal perawatan sarana ibadah, misalnya membersihkan peralatan yang digunakan untuk sholat, membersihkan pekarangan mesjid dan mengadakan acara-acara untuk pemuda yang bersifat keagamaan. Jadi, tidak hanya kegiatan pembangunan sarana dan prasarana desa saja yang dilaksanakan.”

(Wawancara Selasa, 7 Februari 2018)

Segala bentuk kegiatan yang mengasah kemampuan dan bakat pemuda desa di dukung sepenuhnya oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Persatuan Pemuda Dan Pemudi Kuta Cepu (P3KC), kadangkala apabila dana memadai, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sering mendanai program-program yang akan dilakukan oleh para pemuda desa setempat. Misalnya dalam hal lomba dan asah kemampuan antar pemuda desa yang satu dengan pemuda desa yang lain, misalnya dalam hal seni budaya. Perlombaan tari daerah yang saat ini sedang banyak diminati oleh para remaja-remaja Desa Aek Song-Songan menjadi cara baru untuk lebih memperhatikan aspek seni dan budaya desa tersebut.

3. Melaksanakan, Mengendalikan dan Mengawasi Pembangunan.

Reformasi dan otonomi daerah telah menjadi harapan baru bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat desa untuk membangun desanya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Bagi sebagian besar aparat pemerintah desa, otonomi adalah satu peluang baru yang dapat membuka kreativitas bagi aparatur desa dalam mengelola desa. Hal ini jelas membuat pemerintah desa menjadi semakin leluasa dalam menentukan program pembangunan yang akan dilaksanakan, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa tanpa harus didikte oleh kepentingan pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Dari sisi masyarakat, poin penting yang dirasakan di dalam era otonomi adalah semakin transparannya pengelolaan pemerintah desa dan semakin pendeknya rantai birokrasi secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh positif terhadap jalannya pembangunan desa. Dibentuknya Persatuan Pemuda Dan

Pemudi Kuta Cepu (P3KC) di Desa Kuta Cepu merupakan wujud diberlakukannya sistem otonomi desa yang lebih mengedepankan kemampuan dari masyarakat desa itu sendiri. Perubahan nama yang terjadi dan perbaikan struktur-struktur formal desa menjadikan eksistensi Persatuan Pemuda Dan Pemuda Kuta Cepu (P3KC) lebih baik di tengah-tengah masyarakat. Sebagai penduduk asli Desa Kuta Cepu yang merasakan perubahan yang terjadi dalam proses pembangunan, Bapak Musliadi menyatakan:

“Setelah adanya otonomi daerah dan pemekaran wilayah Kecamatan Bandar Pulau menjadi dua wilayah dan dibentuknya Kota Subulussalam oleh Pemerintahan, Desa Kuta Cepu sudah mulai membenahi diri di beberapa bidang. Hal ini berlangsung sejak setahun lalu. Perhatian pihak kecamatan pada pembangunan desa terus dilakukan. Ini dikarenakan lingkup wilayah kerja kecamatan kan tidak terlalu luas, berbeda sekali dengan tahun-tahun sebelum otonomi.”

(Wawancara Selasa, Selasa, 7 Februari 2018).

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat bekerjasama dengan Persatuan Pemuda Dan Pemuda Kuta Cepu (P3KC) di Desa Kuta Cepu mempunyai tugas di dalam mengawasi, mengendalikan dan melaksanakan pembangunan di wilayah desa tersebut. Pada proses pelaksanaan pembangunan desa diupayakan adanya peningkatan kemajuan agar kesejahteraan penduduk meningkat. Selain itu, harus diusahakan pula agar pembangunan dan kemajuan tidak mengakibatkan hal-hal yang negatif pada lingkungan alam, yang kemudian akan merugikan penduduk.

Program pembangunan di desa akan selalu memerlukan biaya di dalam pelaksanaannya. Biaya pelaksanaan pembangunan dapat diperoleh dari:

- a. Bantuan pemerintah untuk biaya pembangunan:
 - 1) Bantuan Daerah Tingkat II melalui APBD
 - 2) Bantuan langsung melalui subsidi desa
 - 3) Bantuan keserasian, yang disalurkan melalui kecamatan
- b. Dari masyarakat (berupa pungutan dan iuran) yang ditetapkan secara musyawarah untuk biaya pembangunan, c. Pendapatan desa sendiri (asli dari desa) untuk biaya rutin
 - 1) Hasil dari tanah desa (titisara, dan sebagainya)
 - 2) Hasil perusahaan desa (pasar desa, koperasi desa, dan pangkalan desa)
 - 3) Tenaga kerja (manusia dan hewan) di desa dan substitusinya
 - 4) Bahan bangunan dan bahan makanan yang dapat dihitung dengan uang
 - 5) Berbagai pungutan resmi yang sah. (Jayadinata, 2006:113).

Berdasarkan dari pengamatan peneliti di dalam melaksanakan pembangunan desa, Lembaga Pemberdayaan beserta Persatuan Pemuda Dan Pemudi Kuta Cepu (P3KC) dan masyarakat sekitar saling bekerja sama. Sebagai contoh dalam setiap kegiatan gotong-royong yang selalu diadakan setiap Jum'at. Menurut informasi yang peneliti peroleh ada beberapa jalan wilayah Desa Kuta Cepu yang diperbaiki dan dibangun oleh partisipasi dari masyarakat, diantaranya jalan masuk menuju Dusun IV yang dahulunya rusak parah dengan kondisi jalan yang berlubang dan akan digenangi oleh air pada saat musim penghujan berhasil dibangun dari dana yang dikumpulkan oleh masyarakat.

Kasus lainnya mengenai masalah pembangunan yang pernah dialami oleh Desa Kuta Cepu adalah perbaikan jembatan penghubung antara Desa Bandar Pulau Pekan dan Desa Kuta Cepu. Untuk yang kesekian kalinya peran Persatuan Pemuda Dan Pemudi Kuta Cepu (P3KC) dan penduduk desa dapat berjalan dengan baik dalam merekonstruksi kondisi jembatan tersebut. Berikut ini adalah hasil kutipan wawancara dengan Bapak Subarno, lelaki berusia 60 Tahun itu menyatakan:

“Peran serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Persatuan Pemuda Dan Pemudi Kuta Cepu (P3KC) serta penduduk desa ini terlihat jelas pada kasus-kasus yang terkait pembangunan, sebagai contoh perbaikan tugu perjuangan di Dusun V. Tugu perjuangan yang memang telah lama dibangun itu direnovasi oleh penduduk sini untuk dapat memperindah bentuknya. Kasus yang lain ada pada perbaikan jalan di Dusun IV yang kesemua pendanaannya dibiayai oleh donatur. Kalau perbaikan-perbaikan jalan dan aliran parit sering dilaksanakan dengan dana APPKD.”

(Wawancara Minggu 10 Februari 2018)

Dalam hal mengawasi jalannya pembangunan di Desa Kuta Cepu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Persatuan Pemuda Dan Pemudi Kuta Cepu (P3KC) melakukan pemeriksaan administrasi. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat melakukan pemeriksaan pembukuan tentang kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan. Namun di dalam penyusunan laporan dana yang masuk dan keluar untuk pelaksanaan kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat tidak dicatat secara sistematis, dalam setiap pelaksanaan yang sifatnya sukarela tidak

mencatatkan secara terperinci. Hanya pada saat penjelasan waktu musyawarah saja. Itupun dilakukan biar masyarakat tahu. Dana pelaksanaan yang berasal dari donatur, tidak ada catatannya. Uang yang terkumpul langsung dimusyawarahkan dan diputuskan kapan akan dilaksanakan waktu musyawarah diadakan

Pada kegiatan mengendalikan pembangunan di Desa Kuta Cepu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Persatuan Pemuda Dan Pemudi Kuta Cepu (P3KC) akan meninjau kembali aspek-aspek yang perlu diperhatikan di dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, antara lain:

- a. Apakah pembangunan tersebut merupakan kebutuhan mayoritas penduduk?
- b. Apakah objek pembangunan tersebut kebutuhannya penting/mendesak?
- c. Apakah objek pembangunan tersebut dapat mengangkat perekonomian atau kesejahteraan penduduk?

Hal-hal yang tersebut di atas yang menjadi pertimbangan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk dapat menetapkan skala prioritas dalam hal mengendalikan pembangunan desa. Tentunya hal ini didasarkan karena persoalan ini menyangkut kehidupan penduduk desa, keputusan sektor mana yang dibangun bukan merupakan hasil keputusan yang tergesa-gesa. Di samping itu azas pemerataan juga menjadi faktor yang paling penting dalam pelaksanaan pembangunan desa. Azas pemerataan maksudnya adalah akan diusahakan tiap-tiap dusun dapat merasakan pembangunan. Dengan diberlakukannya azas pemerataan tersebut tidak hanya satu titik wilayah desa saja yang terus-menerus merasakan pembangunan di desa.

C. Pembahasan

Salah satu karakteristik dari sistem sosial adalah merupakan kumpulan dari beberapa unsur atau komponen yang dapat ditemukan dalam kehidupan bermasyarakat. Kehidupan tersebut terdiri dari beberapa peran-peran sosial. Karakteristik dari sistem yang memperlihatkan bahwa adanya unsur-unsur atau komponen-komponen sistem yang saling berhubungan satu sama lain dan saling bergantung. Di dalam suatu masyarakat meskipun terdapat lebih dari satu lembaga biasanya terdapat satu lembaga yang berada dalam kedudukan teratas dan mendominasi lembaga-lembaga lainnya. Bagi masyarakat desa, lembaga-lembaga dominan ini bisa diwakili oleh lembaga adat maupun lembaga pemerintahan. Besarnya peranan lembaga pemerintahan itu berbeda pada semua desa. Pada desa dengan ikatan *genealogis* peranan lembaga pemerintahan ini tidak terlalu besar karena sistem kekerabatan dengan aturan adat istiadatnya sangat mendominasi kehidupan masyarakat desa ini. Sedangkan pada desa dengan ikatan kedaerahan peranan lembaga pemerintahan cukup besar.

Setiap lembaga yang dibentuk di tengah-tengah masyarakat memiliki peran. Peran tersebut akan berjalan sesuai dengan fungsi yang diharapkan masyarakat terhadapnya. Parsons dalam (Ritzer, 2007:125) menjelaskan sejumlah persyaratan fungsional yang dibentuk dalam lingkungan bermasyarakat, diantaranya menyebutkan bahwa sistem yang telah dibentuk tersebut harus mendapat dukungan dari sistem yang lain agar dapat melanjutkan fungsinya. Seperti halnya lembaga-lembaga sosial yang ada di Desa Kuta Cepu Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa

Kuta Cepu Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam adalah Persatuan Pemuda Dan Pemudi Kuta Cepu (P3KC).

Dalam pelaksanaan suatu peran diperlukan adanya proses internalisasi dan sosialisasi. Pada proses sosialisasi yang berhasil, norma dan nilai menjadi bagian dari suatu lembaga tersebut. Persatuan Pemuda Dan Pemudi Kuta Cepu (P3KC) yang terdapat di lingkungan masyarakat Desa Kuta Cepu memiliki peran di dalam proses perkembangannya di desa. Peran (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Suatu peran mencakup paling sedikit tiga hal, yaitu: peran meliputi aturan-aturan yang dihubungkan dengan posisi lembaga di lingkungan bermasyarakat; peran merupakan suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh suatu lembaga di lingkungan masyarakat; peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu-individu yang menjadi bagian dari suatu lembaga kemasyarakatan.

Berjalannya peran Persatuan Pemuda Dan Pemudi Kuta Cepu (P3KC) di Desa Kuta Cepu dapat dilihat dari kinerja serta kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dengan lancar di dalam pelaksanaannya. Berdasarkan keputusan yang ditetapkan bersama, Persatuan Pemuda Dan Pemudi Kuta Cepu (P3KC) di Desa Kuta Cepu mempunyai tugas, yaitu: menyusun rencana pembangunan yang partisipatif, menggerakkan swadaya dan gotong-royong masyarakat serta melaksanakan, mengendalikan, dan mengawasi pembangunan.

Melihat hasil penelitian yang telah dilakukan melalui studi lapangan dan observasi tentang peran Persatuan Pemuda Dan Pemudi Kuta Cepu (P3KC) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Kuta Cepu, peneliti menyimpulkan bahwa Persatuan Pemuda Dan Pemudi Kuta Cepu (P3KC) ini telah lama dibentuk di Desa Kuta Cepu. Persatuan Pemuda Dan Pemudi Kuta Cepu (P3KC) di Desa Kuta Cepu berjalan baik dengan dibantu oleh lembaga sosial lain yang ada di desa dan pihak Pemerintah Desa. Persatuan Pemuda Dan Pemudi Kuta Cepu (P3KC) melaksanakan pembangunan di desa dengan dibantu partisipasi dari masyarakat desa. Bentuk-bentuk partisipasi tersebut dapat dilihat melalui musyawarah yang dilakukan serta pelaksanaan suatu rencana pembangunan desa.

Persatuan Pemuda Dan Pemudi Kuta Cepu (P3KC) di Desa Kuta Cepu memiliki tujuan dan fungsi di dalam pembentukannya di desa, termasuk di dalam hal ini Desa Kuta Cepu. Susunan pengurus dan anggota Persatuan Pemuda Dan Pemudi Kuta Cepu (P3KC) merupakan hasil pemilihan secara langsung yang dilakukan penduduk Desa Kuta Cepu. Setelah pengurus dan anggota terpilih, Kepala Desa bertugas menetapkan dan mengesahkan anggota dan pengurus yang terpilih tersebut. Persatuan Pemuda Dan Pemudi Kuta Cepu (P3KC) di Desa Kuta Cepu terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang bendahara dan 4 (empat) orang ketua yang mengurus empat bidang, yaitu bidang Keagamaan dan Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Bidang Pembangunan, Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Ekonomi, dan bidang Pemuda, Olah Raga dan Seni. Setiap anggota dan pengurus yang telah disahkan oleh Kepala Desa mempunyai tugas-tugas yang harus dilaksanakan

Dalam hal dana yang dibutuhkan oleh Persatuan Pemuda Dan Pemudi Kuta Cepu (P3KC) diperoleh dari hasil Anggaran Pembiayaan Pengeluaran Kebutuhan Desa (APPKD) dan juga berasal dari dana swadaya masyarakat.

Peran serta masyarakat selalu dibutuhkan dalam setiap berjalannya proses pembangunan di Desa Kuta Cepu termasuk dalam hal bantuan yang bersifat sukarela tersebut. Evaluasi hasil kerja serta rencana kegiatan setiap bulannya selalu dilaksanakan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Di dalam peran yang ditampilkan Persatuan Pemuda Dan Pemudi Kuta Cepu (P3KC) di Desa Kuta Cepu tidak hanya bergerak dalam kegiatan pembangunan desa. Terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan berhubungan dengan kegiatan keagamaan, kegiatan seni dan budaya, kegiatan olah raga dan lain-lain. Untuk itu, Persatuan Pemuda Dan Pemudi Kuta Cepu (P3KC) mempunyai peranan yang penting di Desa Kuta Cepu yang dipilih untuk menjadi lokasi penelitian oleh peneliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis merumuskan beberapa kesimpulan:

1. Persatuan Pemuda Dan Pemudi Kuta Cepu (P3KC) ini telah lama dibentuk di Desa Kuta Cepu. Persatuan Pemuda Dan Pemudi Kuta Cepu (P3KC) di Desa Kuta Cepu berjalan baik dengan dibantu oleh lembaga sosial lain yang ada di desa dan pihak Pemerintah Desa. Persatuan Pemuda Dan Pemudi Kuta Cepu (P3KC) melaksanakan pembangunan di desa dengan dibantu partisipasi dari masyarakat desa. Bentuk-bentuk partisipasi tersebut dapat dilihat melalui musyawarah yang dilakukan serta pelaksanaan suatu rencana pembangunan desa.
2. Persatuan Pemuda Dan Pemudi Kuta Cepu (P3KC) di Desa Kuta Cepu memiliki tujuan dan fungsi di dalam pembentukannya di desa, termasuk di dalam hal ini Desa Kuta Cepu. Susunan pengurus dan anggota Persatuan Pemuda Dan Pemudi Kuta Cepu (P3KC) merupakan hasil pemilihan secara langsung yang dilakukan penduduk Desa Kuta Cepu. Setelah pengurus dan anggota terpilih, Kepala Desa bertugas menetapkan dan mengesahkan anggota dan pengurus yang terpilih tersebut.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan tersebut terdapat beberapa saran terkait dengan hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu:

1. Perlu ditingkatkannya koordinasi antara sesama anggota dan pengurus Persatuan Pemuda Dan Pemudi Kuta Cepu (P3KC) di Desa Kuta Cepu dalam melaksanakan tugas pokok masing-masing demi kemajuan pembangunan di Desa Kuta Cepu.
2. Perlu adanya perubahan dalam formal anggota Persatuan Pemuda Dan Pemudi Kuta Cepu (P3KC) pada pemilihan yang akan datang. Sebaiknya anggota yang mempunyai pekerjaan tetap sulit untuk membagi waktunya dengan kegiatan yang dilaksanakan menjadi pertimbangan oleh penduduk desa dalam hal menetapkan anggota terpilih.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Huraerah. 2011. Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat. Bandung: Humaniora.
- Adi Fahrudin. 2012. Pengantar Kesejahteraan Sosial. Bandung: PT Refika Aditama
- Alfitri. 2011. Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
- Andy Norton. Dkk. 2011. Social Protection Concepts And Approaches: Implications For Policy And Practice In International Development. Overseas Development Institute 111 Westminster Bridge Road London SE1 7JD UK.
- Antonius Bungaran Simanjuntak, 2013. *Dampak Otonomi Daerah di Indonesia, Merangkai Sejarah Politik dan Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Direktorat Kesejahteraan Anak dan Keluarga. 1987. *Pedoman Pembinaan Program dan Kegiatan Karang Taruna*. Dirjen Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial, Jakarta
- Hartomo. H. 2011. *Ilmu Sosial Dasar*. Bumi Aksara, Jakarta
- Lexy J Maleong. 2006. *Dasar-dasar manajemen*. Bandung: Gajah Mada University Press
- Muhammad Idrus. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Penerbit Erlangga, Yogyakarta
- Nurcholis Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga
- Rukminto, Adi Isbandi. 2005. *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Jakarta: FISIP UI Press
- Sadu Wasistiono. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Fokusmedia, Bandung
- Soekanto, Soerjono, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT.Grafindo Parsada, Jakarta

Soetomo. 2011. *Pemberdayaan Masyarakat*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta

Soeharto, Edi. 2009. *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*. Bandung:
Fisip UI Press

Ulber Silalahi. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. PT. Refika Aditama, Bandung

Zubaedi. 2013. *Pengembangan Masyarakat Wacana & Praktik*. Jakarta: Kencana



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website : http://www.umsu.ac.id Email : rektor@umsu.ac.id

Unggul, Cerdas & Terpercaya
 Marjweeb surat ini agar disebutkan
 no dan tanggalnya

Sk-1

**PERMOHONAN PERSETUJUAN
 JUDUL SKRIPSI**

Kepada Yth.
 Bapak Ketua Jurusan ...IKS.....
 FISIP UMSU
 di
 Medan.

Medan, ..24.....MARET.....20.17.

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : M. I. M. NTO
 NPM : 1303090059
 Jurusan : Ilmu Kerja Jaitaraan Sosial
 Tabungan sks : 124.... sks, IP Kumulatif 3.02..

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	peran persatuan pemuda dan pemuda kota capu (P3bc) terhadap pemberdayaan masyarakat desa kota capu kecamatan dan simpang biri kota subussalam	Kec K. Pradi 24/3/17 Ate
2	peranan kepala keluarga dalam meningkatkan kondisi omnis dan kesehatan anak di desa kota capu kecamatan dan simpang biri kota subussalam	X
3	kepuasan remaja yang di penuhi oleh pola asuh orang tua dan lingkungan teman di desa kota capu kecamatan simpang biri kota subussalam	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang disahkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti lunas uang SPP tahap berjalan;*)

Demikianlah permohonan saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak, saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Jurusan :
 Diteruskan kepada Dekan untuk
 Penetapan judul dan pembimbing.

Medan, tgl. 24.....MARET.....20.17.

Ketua,

(ARAF. M. ... : 5665. M. S. P.)

194

Pemohon,

(.....M. I. M. NTO.....)

PK I = Ghel Azar
 PK II = Adh Jalal B

*) dilampirkan setelah judul ditandasetujui oleh Ketua Jurusan.



UIN
 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
 Jalur Cerdas & Terpercaya
 menjawab surat ini agar disebutkan
 dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474

Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

PERPANJANGAN TERAKHIR
SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING
 Nomor : 194 /SK/II.3-AU/UMSU-03/F/2018

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, setelah memperhatikan :

1. Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor 1 Tahun 2003 ;
2. Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No.194 /SK/II.3-AU/UMSU-03/F/2017 tgl.24 Maret 2017 yang telah berakhir masa berlakunya tanggal : 24 Maret 2018 ;

Memberikan **Perpanjangan Terakhir** Masa Berlakunya Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No.194 SK/II.3-AU/UMSU-03/F/2018 tgl. 24 Maret 2018 untuk Mahasiswa sebagai berikut :

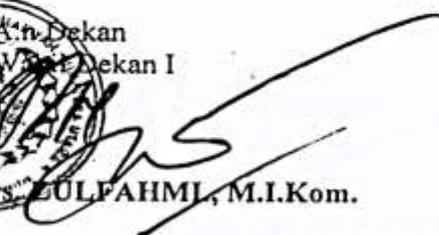
Nama mahasiswa : **SUMIANTO**
 NPM : 1303090059
 Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
 Semester : X (Sepuluh) Tahun Akademik 2017 / 2018
 Judul Skripsi : **PERAN PERSATUAN PEMUDA DAN PEMUDI KUTA CEPU (P3KC) TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KUTA CEPU KECAMATAN SIMPANG KIRI KOTA SUBULUSSALAM.**

Pembimbing I : Drs. Efendi Agus., M.Si.
 Pembimbing II : Drs. Abdul Jalal Batubara., M.AP

Selama 3 (Tiga) Bulan sampai tanggal 27 Oktober 2018 dengan ketentuan :

1. Penulisan Skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor 1 Tahun 2003 tanggal 5 Shafar 1424 H / 7 April 2003 M.
2. Surat Perpanjangan Penetapan Judul Skripsi dan Naskah Skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sampai batas tanggal 27 Oktober 2018 dan atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Medan,
 Pada Tanggal, 10 Rajab 1439 H
 27 Maret 2018 M

Dekan
 Dekan I

 Drs. EULFAHMI, M.I.Kom.

Tembusan

1. Kutua P.s. Ilmu Komunikasi FISIP UMSU di Medan.
2. Pembimbing I dan II ybs. di Medan ;



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Cerdas & Terpercaya
 web surat ini agar disebutkan
 tanggalnya

Sk-3

**PERMOHONAN
 SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Kepada Yth.
 Bapak Dekan FISIP UMSU
 di
 Medan.

Medan, 19 JANUARI 2018

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : SUMIJANTO
 N P M : 1303090059
 Jurusan : ILMU KESEJAHATAN DAN SOSIAL

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. /SK/II.3/UMSU-03/F/20..... tanggal dengan judul sebagai berikut :

PERAN PERBATUAN PEMUDA DAN PEMUDI KUTA CEPU (P3KC)
TERHADAP DEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KUTA CEPU
KECAMATAN SIMPANG KIRI KOTA SUBULUSALAM

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester I s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proopsosal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 5)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :

Pembimbing

(Drs. Efendi Agus, M.Si)

Pemohon,

(SUMIJANTO)

UNDANGAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
Nomor : 012/KEP/IL.3-AU/UMSU-03/F/2018

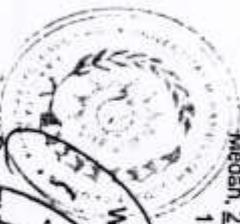
Program studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Hari, Tanggal : Senin, 15 Januari 2018
W a k t u : 08.00 WIB s/d Selesai
Tempat : LAB. FISIP Gedung C UMSU
Pemimpin Seminar : ARIFIN SALEH, Dr, M.SP

No.	Nama Mahasiswa Penyaji	Nomor Pokok Mahasiswa	Dosen Penanggung	Pembimbing	Judul Proposal Skripsi
6	SUMANTO	1303090059	1 MOHD YUSRI, Dr, M.Si	1 EFENDI AUGUS, Drs, M.Si 2 ABDUL JALAL BATUBARA, Drs, M.AP	PERAN PERSATUAN PEMUDA DAN PENUDI KUTA CEPU (PKC) TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KUTA CEPU KECAMATAN SIMPANG KIRI KOTA SUBULUSSALAM
7	KUSRIMAN	1403090009	1 MUJAHIDIN, S.Sos, M.SP	1 AZAMIRIS CHANRA, Dr, H, M.AP	PERANAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) KABUPATEN GAYO LUES DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN REMAJA
8	BUSTAMI	1403090002	1 AZAMIRIS CHANRA, Dr, H, M.AP	1 EFENDI AUGUS, Drs, M.Si	UPAYA PEMERINTAHAN DESA MENORONG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA MELALUI DANA BANTUAN SOSIAL KEMASYARAKATAN DI DESA UJUNG TINGGI KECAMATAN SIMELUE TIMUR KABUPATEN SIMELUE
9	RADA YANTI	1403090036	1 EFENDI AUGUS, Drs, M.Si	1 MUJAHIDIN, S.Sos, M.SP	PERAN POSYANDU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK PEMERIKSAAN KESEHATAN BALITA DAN IBU HAMIL (Studi di Posyandu Desa Siumajang No IX - X Kabupaten Labura - Sumut)
10	JELPIN SARIS SUPRATMAN	1403090055	1 AZAMIRIS CHANRA, Dr, H, M.AP	1 EFENDI AUGUS, Drs, M.Si	EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI KELURAHAN BELAWAN II KECAMATAN MEDAN BELAWAN KOTA MEDAN

Medan, 27 Rabiul Akhir 1439 H
15 Januari 2018 M

An Dekan,
Wakil Dekan I

Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom.





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: http://www.umsu.ac.id E-mail: rektor@umsu.ac.id

Cerdas & Terpercaya
 Untuk surat ini agar disebutkan
 tanggalnya

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : **SUMIANTO**
 NPM : **1303090069**
 Jurusan : **ILMU KESAJAH TERAPAN SOSIAL**
 Judul Skripsi : **PERAN PERSATUAN PEMUDA BAKI PEMUDI KUTA CEPU (P3KC) TERHADAP PEMBERDAYAAN DESA KUTA CEPU KECAMATAN SIMPANG KIRI KOTA SUBULUSSALAM**

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	18-1-2018	Bimbingan Proposal untuk Seminar (Preliminary)	
2	08-2-2018	ace. Proposal	
3	15-03-2018	Bimb. Penyusunan literature reudition tidak ada.	
4	2-4-18	ace y. Sidap/ajia Skripsi	

Medan, ... 4 April ... 2018

Dekan,

 (Dr. P. ... I.T.D. ...)

Ketua Program Studi,

 (Arif ... S.Sos. M.S.P.)

Pembimbing ke : II.

 Hidayat Jalal Batubara, Drs M.P.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Nomor : 194 / KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2018
Lampiran : -,-
Hal : *Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa*

Medan, 02 Djumadi Awwal 1439 H
19 Januari 2018 M

**Kepada : Yth, Ketua Persatuan Pemuda
Dan Pemudi Kuta Kepu (P3KC)
Kecamatan Simpang Kiri Kota SubulusSalam
di -
Tempat**

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak / Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama mahasiswa : **SUMIANTO**
N P M : 1303090059
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Semester : IX (Sembilan) Tahun Akademik 2017 / 2018
Judul Skripsi : **PERAN PERSATUAN PEMUDA DAN PEMUDI KUTA
KEPU (P3KC) TERHADAP PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA KUTA KEPU KECAMATAN
SIMPANG KIRI KOTA SUBULUSSALAM.**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Dekan

Drs. TASRIF SYAM, M.Si



PERSATUAN PEMUDA PEMUDI KUTA CEPU
“ P 3 K C “
KAMPONG KUTA CEPU KECAMATAN SIMPANG KIRI
KOTA SUBULUSSALAM

Lampiran : Subulussalam, 02 februari 2018

Hal : *Balasan*

Kepada : Yth, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di-
Tempat

Assamu 'alaikum wr. wb

Sehubungan dengan surat saudara pada tanggal 19 januari 2018 perihal PerizinanTempat kegiatan Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan ini telah kami setuju mengadakan penelitian di **PERSATUAN PEMUDA DAN PEMUDI KUTA CEPU (P3KC)** atas nama :

Nama : **SUMIANTO**

Npm : 1303090059

Judul skripsi : **PERAN PERSATUAN PEMUDA DAN PEMUDI KUTA CEPU (P3KC) TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KUTA CEPU KECAMATAN SIMPANG KIRI KOTA SUBULUSSALAM.**

Demikianlah atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih, wassalamu' alaikum wr. wb.



Ketua persatuan pemuda dan pemudi kuta cepu (p3kc)

FIRMANSYAH CIBRO